

BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Sajian Data

Media massa mempunyai peranan penting dalam penyebaran informasi/berita kepada masyarakat, selain itu media massa dikatakan mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Bahkan media massa bisa mengerahkan masyarakat seperti apa yang akan di bentuk di masa yang akan mendatang. Berbagai media massa yang berada di sekitar kita mulai dari media cetak maupun online. Media cetak dala hal ini surat kabar harian (SKH), lebih mengutamakan kekuatan isi pesan (teks) pada sebuah berita dan analisa yang lebih tajam. SKH menyampaikan sebuah informasi secera detail dan rinci, sehingga dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita.

Berita adalah hasil konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Wartawan sudah memiliki pandangan dari *angel* mana dia akan menulis sebuah berita. Selain itu, bisa pula dilihat dari pemilihan narasumber yang cenderung mengakomodir sudut pandang tertentu. Hal ini dikarenakan opini tidak bisa dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif (Eriyanto, 2002:27). Hal tersebut berkaitan erat dengan bagaimana media cetak membingkai (*framing*) setiap pemberitaannya dan kemudian kepada khlayak.

Dalam ilmu komunikasi, konsep *framing* sering di gunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media massa. Framing dapat di pandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam kontek yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari isu yang lain. Dengan kata lain, analisi framing dipakai untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana.

Berdasarkan konsep psikologis, *framing* bisa di lihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh pengetahuan bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media massa saat mengkonstruksi fakta, yaitu dengan strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam beritas agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khlayak sesuai prespektif (Sobur, 2001:162).

Data pada bab III ini tentang pemberitaan sabda raja keraton Yogyakarta pada SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Harian Jogja dengan mengambil obyek pemberitaan pada bulan Mei 2015. Pemelihan bulan Mei 2015 sebagai penelitian karena pada 30 April 2015 Sultan Hamengku Buwono X mengucapkan isi sabda raja. Semenjak Sultan Hamengku Buwono X mengucapkan isi Sabda Raja maka pemberitaan mengenai Sabda Raja semakin marak di berbagai media khususnya pada media cetak lokal SKH kedaulatan Rakyat dan SKH Harian Jogja.

Pada bab ini peneliti akan menganalisis teks media, yakni pemberitaan mengenai Sabda Raja kraton Yogyakarta SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH

Harian Jogja. Untuk menganalisis teks, penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Kosicki. Model ini lebih detail dalam menganalisa setiap teks berita yang ada. Selain itu, dalam model ini terdapat unit pengamatan selain teks berita itu sendiri, seperti unsur grafis yang meliputi penggunaan gambar, tabel, dan tata letak berita mengenai Sabda Raja Keraton Yogyakarta, berikut tabel berita SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH *Harian Jogja* dari tanggal 1 Mei – 15 Mei 2015 :

Tabel 3.1

No	Tanggal	Kedaulatan Rakyat	<i>Harian Jogja</i>
1	Jumat 1 Mei 2015		
2	Sabtu 2 Mei 2015	'Hapus' Gelar Khalifatullah Sabdaraja Timbulkan Pro-Kontra	Sultan Di Nilai Tabrak Adat
3	minggu 3 Mei 2015	Jelaskan Sabdaraja Besok, Sultan kirim Surat ke Mendagri	
4	Senin 4 Mei 2015		DPRD minta penjelasan Sultan
5	Selasa 5 Mei 2015	Perlu Kekompakan Kraton	Kerabat Sultan Akui Situasi Kraton Pelik
6	Rabu 6 Mei 2015	GKR Pembayun Jadi GKR Mangkubumi	Pembayung Calon Ratu
7	Kamis 7 Mei 2015	Sultan Tampung Semua Masukan	Konflik Kraton Meruncing
8	Jumat 8 Mei 2015	Sultan bantah Isi Sabda Raja	Rayi dalem Galang Dukungan
9	Sabtu 9 Mei 2015	Sabdaraja untuk Perubahan Zaman	Saya Menjalankan Perintah Leluhur
10	Minggu 10 Mei 2015	Selamatkan Keraton Jogja	11 Pangeran Kukuh Tolak Sabda Raja
11	Senin 11 Mei 2015	Soal Internal Kraton Bisa Berdampak ke UUK	Penjelasan Sultan Belum Diterima
12	Selasa 12 Mei	Tak ada Plt Sultan	Buwono Terkunci

	2015		Keistimewaan
13	Rabu 13 Mei 2015	Sultan : Sabdaraja Itu Mutlak	Sabda Raja Tak Bisa Batal
14	Kamis 14 Mei 2015		
15	Jumat 15 Mei 2015		Kasultanan Menunggu Solusi

Dari sajian tabel di atas peneliti nantinya dalam menganalisis berita-berita yang di muat dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Harian Jogja akan membagi 3 sub tema, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membandingkan isi wacana yang ditampilkan dari kedua SKH tersebut, juga agar dalam menganalisa beritanya lebih terstruktur, berikut pembagian sub tema dari 25 berita yang di sajikan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Harian jogja :

1. Pembelaan vs penyangkalan Sabda Raja
2. Penerus tahta vs Perampas tahta keraton Jogja
3. Wacana lain kedua Surak Kabar Harian

Pisau analisis yang di pakai adalah analisis *framing* model Pan dan Kosicki yang mana dalam menganalisisnya metode ini menggunakan empat perangkat analisis yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Pembagian berita dari SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Harian Jogja kedalam masing masing sub tema serta analisis bisa dilihat sebagai berikut :

1. Pembelaan dan Penyangkalan Sabda Raja

Pada sub bab ini peneliti menemukan beberapa berita seputar pembelaan dan penyangkalan mengenai Sabda Raja yang di beritakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dan Harian Jogja bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Pemberitaan Mengenai Pembelaan dan Penyangkalan Sabda Raja

Koran	No	Hari/Tanggal Terbit	Judul Berita
Kedaulatan Rakyat	1	Selasa 5 Mei 2015	Perlu Kekompakan Kraton
	2	Sabtu 9 Mei 2015	Sabdaraja untuk Perubahan Zaman
	3	Rabu 13 Mei 2015	Sultan : Sabdaraja Itu Mutlak
Harian Jogja	1	Sabtu 2 Mei 2015	Sultan Di Nilai Tabrak Adat
	2	Sabtu 9 Mei i 2015	Saya Menjalankan Perintah Leluhur
	3	Minggu 10 Mei 2015	11 Pangeran Kukuh Tolak Sabda Raja
	4	Selasa 12 Mei 2015	Buwono Terkunci Keistimewaan
	5	Rabu 13 Mei 2015	Sabda Raja Tak Bisa Batal

Berikut analisis Sintaksis peneliti mengenai pemberitaan pembelaan Sabda Raja pada SKH Kedaulatan Rakyat, bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3

Analisi Sintaksis dalam SKH Kedaulatan Rakyat

STRUKTUR SINTAKSIS		
No	Terbit	<i>Headline</i> (judul)
1	Selasa 5 Mei 2015	'Perlu Kekompakan Kraton
2	Sabtu 9 Mei 2015	Sabdaraja untuk Perubahan Zaman
3	Rabu 13 Mei 2015	Sultan : Sabdaraja Itu Mutlak
<i>Lead</i>		
1	Selasa 5 Mei 2015	Sabdaraja atau bisa dibilang (dekrit) Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat gejolak (pro-konta) di internal kerlarga kraton
2	Sabtu 9 Mei 2015	Sri sultan Hamengku Buwono X menegaskan Keluarga Sabdaraja tanggal 1Mei 2015, diikuti dhawuhraja tanggal 5 Mei 2015 merupakan langkah Kraton untuk menghadapi perubahan zaman dan menjaga eksistensi Kraton.
3	Rabu13 Mei 2015	Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan surat penjelasan Sabdaraja akan segera dikirimkan kepada kementerian Dalam Negeri.
Latar Informasi		
1	Selasa 5 Mei 2015	Gejolak di internal kraton bukan tidak mungkin akan menyebar ke eksternal kraton. Jika internal keluarga kraton tidak solid, Sabdaraja bisa berdampak pada amandemen undang-undang keistimewaan.
2	Sabtu 9 Mei 2015	Dawuhraja merupakan petunjuk dari Allah SWT dan para leluhur yang merupakan jawaban atas tantangan Kraton ke depan
3	Rabu13 Mei 2015	Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan dirinya sudah bertemu dengan perwakilan dari masyarakat baik itu ulama dan sebagainya tetapi hal tersebut tidak di publikasikan

Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Selasa 5 Mei 2015	<p>Jazir (Budayawan DIY)</p> <p>Penghapusa Gelar Khalifatullah logis di lakukan Sultan. Palsunya gelar Khalifatullah ini pemberian Kekhalifahan Turki Usmani untuk Kerajaan Demak, Mataram, dan Pajang. Hal itu di tandai dengan pemberian Bendera (Pataka) Kyai Tunggul Wulung dan Kyai Pareanom. Namun hal itu tidak dianggap berlaku lagi, karena saat ini Sultan sebagai Gubernur DIY datang dari pemerintah RI melalui diterbitkannya UU no.12 Tahun 2013 tentang undang-undang ke istimewaan</p>
2	Sabtu 9 Mei 2015	<p>Sugeng Bayu Wahyono (Sosiolog UNY)</p> <p>Berharap adanya perbedaan yang terjadi di Kraton segera berakhir karena masyarakat mengharapkan <i>tata titi tentrem</i>.</p>
3	Rabu13 Mei 2015	<p>Sultan HB X</p> <p>Batal demi hukum itu apa ? ini aturan kraton bukan undang-undang atau konstitusi republik. Jadi demi hukum yang mana ? sultan itu kan mutlak</p> <p>Sulistyo Atmojo (Ketua Pandu Bantul)</p> <p>Urusan Kraton diselesaikan dengan tata kelola di Kraton secara internal dan melibatkan keluarga besar Kraton Ngayogyakarta, bukan orang lain ataupun dari Kraton Surakarta sekalipun</p>
Penutup		
1	Selasa 5 Mei 2015	<p>Sultan menghapus gelar Khalifatullah, karena tidak adalagi hubungan dengan Kekhalifan Turki Usmani melainkan pemberian dari pemerintah RI</p>
2	Sabtu 9 Mei 2015	<p>Sabdaraja dan Dhawuhraja konteksnya cuku tinggi sayang nya tidak semua orang bisa memahami. Ha itu yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman. Hal itu karena poin paling penting yang tidak di pahami. Padahal posisi Kraton Yogyakarta itu tidak bersifat statis tetapi mengikuti perkembangan zaman.</p>
3	Rabu13 Mei 2015	<p>Pandu bersama masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan, ketentraman dan kerukunan watga serta berkomitmen dan tidak mudah terprovokasi oleh langkah langkah yang tidak bertanggung jawab. "Pandu turut berdoa agar polemik ini cepat berakhir," pangkas</p>

		Sulistyo
--	--	----------

Dari analisis **sintaksis** di atas, dapat dilihat mengenai *frame* Kedaulatan Rakyat yang membela suksesi Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono Kraton Yogyakarta, bisa dilihat dari penggunaan kelompok dan perseorangan. Struktur sintaksis tersebut mencakup : *Headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan dan penutup.

Dari *headline* di atas SKH Kedaulatan Rakyat menerbitkan 3 *headline* yang mendukung atau pembelaan terhadap Sabdaraja. Perlu Kekompakan Kraton, Sabda Raja untuk Perubahan Zaman, dan Sultan : Sabdaraja Itu Mutlak. *Headline* “Perlu Kekompakan Kraton” ini di gunakan SKH Kedaulatan Rakyat ingin menyampaikan kepada masyarakat luas khusus nya masyarakat Yogyakarta agar memberikan dukungan kepada Sultan Hamengku Buwono X dan Sabda Raja, dan bagi para abdi dalem maupun pihak internal Kraton yang belum sependapat dan belum mendukung Sabda Raja ini agar bisa merubah pola pikir mereka dan setuju dan sependapat dengan isi Sabda Raja yang di keluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X, dengan kata lain apabila masyarakat sudah mendukung penguasanya maka pihak yang tidak mendukung ini secara tidak langsung akan dinilai sebagai pembelot atau pengkhianat. Di lain sisi *Headline* “Sabdaraja untuk Perubahan Zaman” jelas menggambarkan Kedaultan Rakyat ingin menampilkan bahwa Sabda Raja di ucapkan untuk menjaga eksistensi Kraton saat ini dan masa mendatang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman, dengan kata lain *headline* ini menjelaskan bahwa Kraton bukanlah Kerajaan kuno zaman dalu hulu,

melainkan Kerajaan yang dapat mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Sementara *Headline* “Sultan: Sabdaraja itu Mutlak” menegaskan bahwasanya ketika seorang Raja bertuturkata ataupun memberi perintah, maka masyarakat ataupun abdi dalem Kraton mematuhi dan mendukung perintah tersebut, kata “mutlak” sendiri memiliki makna : segalanya, seutuhnya, tidak terbatas, tidak boleh tidak (<http://kbbi.web.id/mutlak>), selain itu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) halaman 677 kata mutlak juga diartikan segalanya, seutuhnya, tidak terbatas, tidak boleh tidak, bisa dilihat SKH Kedaulatan Rakyat sangat menjunjung tinggi martabat Sultan dengan kata “mutlak” sebagai *headline* di berita ini.

Perangkat sintaksis selanjutnya adalah *lead*, *lead* merupakan latar awal dari sebuah berita yang bisa memberi petunjuk sudut pandang dari berita tersebut dan dapat memberikan perspektif dan keseluruhan isi berita, dari ketiga berita di atas *lead* yang dipilih adalah :

Sabdaraja atau bisa dibilang (dekrit) Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat gejolak (pro-kontra) di internal kerlanga kraton (terbit Selasa 5 Mei 2015)

Sri sultan Hamengku Buwono X menegaskan Keluarga Sabdaraja tanggal 1 Mei 2015, diikuti dhawuhraja tanggal 5 Mei 2015 merupakan langkah Kraton untuk menghadapi perubahan zaman dan menjaga eksistensi Kraton (terbit Sabtu 9 Mei 2015).

Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan surat penjelasan Sabdaraja akan segera dikirimkan kepada kementerian Dalam Negeri (Rabu 13 Mei 2015)

Dari *lead* pertama wartawan mencoba memberikan pandangan bahwa setiap kejadian selalu saja menimbulkan pro dan kontra, tidak terkucuali Sabda

Raja di Kasultanan Yogyakarta ini. Dalam *lead* kedua Kemudian wartawan mencoba mengarahkan para pembaca kepada tujuan dan manfaat di ucapkannya Sabda Raja yang mampu menghadapi perubahan zaman dan tetap bisa menjaga eksistensi Kraton Yogyakarta. Dalam *lead* yang ketiga wartawan mengajak para pembaca atau masyarakat bahwa Sabda Raja tidak bisa di ganggu gugat lagi ataupun tidak memiliki kesalahan yang harus di tinjau ulang, maka dari itu pihak Kraton Yogyakarta akan langsung mengirimkan Sabda Raja ini kepada Kementerian Dalam Negeri.

Perangkat Sintaktis selanjut nya adalah **latar informasi**, dari latar informasi ketiga berita diatas mencoba memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat frame dari SKH Kedaulatan Rakyat bahwa memang Sabda Raja sebaik nya di setujui dan di dukung oleh semua pihak, seperti pada latar informasi berikut :

Gejolak di internal kraton bukan tidak mungkin akan menyebar ke eksternal kraton. Jika internal keluarga kraton tidak solid, Sabdaraja bisa berdampak pada amandemen undang-undang keistimewaan (terbit Selasa 5 Mei 2015).

Dari latar informasi di atas wartawan mencoba memberikan gambaran jika konflik masih terjadi di Kraton maka tidak menutup kemungkinan ke istimewa Yogyakarta bisa di cabutkan dari UUK, maka dari itu wartawan mencoba mengbingkai sedemikian rupa agar masyarakat yogyakarta ikut mendukung Sabda Raja yang akan di serahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Dari **sumber berita** pengutipan dan pernyataan, hampir keseluruhan sumber berita dari SKH Kedaulatan Rakyat merupakan kalangan yang membela

dan mendukung Sabda Raja, berikut ini sumber berita yang dikutip oleh SKH Kedaulatan Rakyat, Jazir (Budayawan DIY), Sugeng Bayu Wahyono (Sosiolog UNY), Sulistyo Atmojo (Ketua Pandu Bantul).

Dari semua orang yang di jadikan sumber diatas yang dijadikan kutipan atau pernyataan dari SKH Kedaulatan Rakyat cenderung membela Sabda Raja ataupun seolah di buat mendukung Sabda Raja. Seperti pernyataan yang diambil dari Jazir (Budayawan DIY) yang dibuat seolah memperkuat *frame* dari SKH Kedaulatan Rakyat yang membela Sabdaraja, inilah pernyataan Jazir :

Penghapusan Gelar Khalifatullah logis di lakukan Sultan. Pasalnya gelar Khalifatullah ini pemberian Kekhalifahan Turki Umani untuk Kerajaan Demak, Mataram, dan Pajang. Hal itu di tandai dengan pemberian Bendera (Pataka) Kyai Tunggul Wulung dan Kyai Pareanom. Namun hal itu tidak dianggap berlaku lagi, karena saat ini Sultan sebagai Gubernur DIY datang dari pemerintah RI melalui diterbitkannya UU no.12 Tahun 2013 tentang undang-undang ke istimewa.

Dengan mencantumkan sumber seorang budayawan SKH Kedaulatan Rakyat ingin menandakan kepada para pembaca atau masyarakat, bahwa seorang Budayawan yang mengerti tentang seluk beluk budaya dan sejarah Kraton membela dan membenarkan apa isi Sabdaraja yang di ucapkan oleh Sultan Hamengku Buwono X ini. seperti halnya yang dikatakan oleh Romli, berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, tokoh, ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi politik sosial budaya, dan sebagainya. (Romli, 2001 : 8)

Struktur terakhir adalah **penutup**, dari ketiga berita tersebut tidaklah mengandung makna yang begitu berarti atau penting, seperti halnya pada tanggal Selasa 5 Mei 2015 seperti berikut :

Sultan menghapus gelar Khalifatullah, karena tidak adalagi hubungan dengan Kekhalifan Turki Usmani melainkan pemberian dari pemerintah RI

Kata kata yang di pakai pada penutup ini hanyalah pengulang kata dari pernyataan Jazir (Budayawan Yogyakarta) yang telah di tulis di paragraf sebelum nya. Kedua berita lain nya sama saja hanya penguatan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Seperti kebanyakan berita yang menggunakan sistem segitiga terbalik yang hal penting atau poin inti nya di sampaikan di awal dan yang kurang penting di tempatkan di akhir, penutup berita di atas bisa jadi hanya berfungsi sebagai pemberi informasi tentang berbagai pihak yang masih menolok atau tidak menyetujui tentang Sabdaraja.

Struktur selanjut nya adalah **skrip**, dalam struktur ini pola yang diamati ialah 5W+1h (*who, what, when, where, why, + how*). Unsur berita 5W+1H tidak selalu lengkap di jumpai dalam berita. Unsur berita 5W+1H ini bisa menjadi penanda *framing* yang penting, skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan agar lebih terlihat menonjol dan menyembunyikan bagian informasi penting lainnya.

Dari ketiga berita di atas, SKH Kedaulatan Rakyat lebih menonjolkan *what* (apa Sabdaraja) dan *why* (Kenapa Sabdaraja) yang selalu di tempatkan diawal dan diuraikan secara panjang lebar, sementara unsur (*where*) tidak banyak di jelaskan karena memang bertampat di Kraton Yogyakarta dan *when*

(tanggal wawancara berlangsung) dan *how* (bagaimana terjadinya Sabdaraja) hanya sedikit menjelaskan, karena Sabdaraja diceritakan terjadi dengan mendadak. Cara wartawan menyusun skrip dengan menonjolkan *what* dan *why* bertujuan agar memperkuat frame SKH Kedaulatan Rakyat sendiri yaitu *who* (siapa yang membela Sabdaraja) .

Selanjut nya adalah struktur **tematik**, struktur ini dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau di buat wartawan. Dalam teks ketiga berita di atas secara umum memiliki tema yang sama yaitu pembelaan terhadap Sabdaraja dengan berbagai argumentasi yang di tampilkan, seperti “Sabdaraja tanggal 1 Mei 2015, diikuti dhawuhraja tanggal 5 Mei 2015 merupakan langkah Kraton untuk menghadapi perubahan zaman dan menjaga eksistensi Kraton”, “Sabdaraja atau bisa dibilang (dekrit) Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat gejolak (pro-kontra) di internal kerluarga kraton”, “Dawuhraja merupakan petunjuk dari Allah SWT dan para leluhur yang merupakan jawaban atas tantangan Kraton ke depan”, “Gejolak di internal kraton bukan tidak mungkin akan menyebar ke eksternal kraton”. Argument-argument tersebut umumnya ditempatkan pada paragraf pertama sampai pertengahan isi berita yang memiliki porsi lebih besar dari pada pendapat yang cenderung penyangkalan Sabdaraja. Dari unsur tematik elmen lain yang bisa diamati adalah koherensi : pertalian atau jalinan antar kalimat, proposisi atau kalimat, dalam beritadi atas terdapat beberapa elemen koherensi diantaranya :

1. Sabdaraja atau bisa dibilang (dekrit) Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X **membuat** gejolak (pro-kontra) di internal keluarga kraton.

2. Dawuhraja merupakan petunjuk dari Allah SWT dan para leluhur yang **merupakan** jawaban atas tantangan Kraton ke depan.
3. Gejolak di internal kraton bukan tidak mungkin **akan** menyebar ke eksternal kraton.

Dalam poin pertama koherensi yang di pakai adalah hubungan sebab akibat dengan menggunakan kata ‘membuat’, kata ini menunjukkan bahwa dengan diucapkan nya Sabda Raja akan menyebabkan pro-kontra di kalangan Kraton, seperti di ketahui setiap pengambilan keputusan yang di ambil akan menyebabkan sebuah hubungan sebab akibat, dari Sabda Raja ini tentu mengakibatkan pro-kontra yang terjadi baik di kalangan Kraton maupun masyarakat. Pada poin kedua koherensi yang di pakai penjelas dengan menggunakan kata ‘merupakan’ kata ini memperjelas bahwa Sabda Raja adalah solusi bagi Kraton untuk menghadapi masa depan dan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman di era modern ini. Pada poin ketiga koherensi yang digunakan adalah koherensi sebab akibat dengan menggunakan ‘akan’, kalimat tersebut menunjukkan bahwa gejolak di internal kraton bisa saja menyebar ke eksternal kraton dan ke masyarakat. Koherensi sendiri adalah Koherensi adalah pengaturan secara rap kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya menurut (Wohl, 1978 : 25).

Struktur selanjutnya adalah **retoris**, dalam struktur retoris analisis yang akan di tonjolan lebih bagaimana wartawan menekankan sebuah fakta menggunakan kata, idiom, gambar/foto dan grafik, media massa juga menentukan apakah peristiwa hendak ditulis secara panjang atau pendek apakah

di tempatkan di halaman pertama atau tidak; apakah peristiwa ditulis secara bersambung atautakah tidak. Semua pilihan tersebut adalah kemungkinan yang dapat di ambil oleh media (Eriyanto, 2002 : 27-28). Dari ketiga berita di atas wartawan lebih menekankan berita melalui leksikon seperti pada pemberitaan “Sabdaraja atau bisa dibilang (dekrit) Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membuat gejolak (pro-konta) di internal kerlarga kraton(terbit Selasa 5 Mei 2015)”, dekrit sendiri memiliki arti keputusan, ketetapan, atau perintah yang di keluarkan oleh kepala negara, pengadilan dan lain sebagai nya (KBBI 1999:218). Disini wartawan menggunakan kata dekrit sebagai persamaan Sabdaraja, sebagaimana di ketahui kata-kata dekrit biasanya di tujukan kepada Presiden atau keputusan yang di ambil oleh President, dengan kata lain wartawan ingin mensejajarkan Sultan Hamengku Buwono sebagai seorang President yang berkuasa di Yogyakarta.

Tabel 3.4

Frame Kedaulatan Rakyat : Pembelaan Terhadap Sabda Raja Dari Berbagai Kalanagan

Elemen	Strategi penulisan
Sintaksis	Ketiga narasumber berasal dari kalangan yang membela dilaksanakan nya Sabdaraja. Penemoatan narasumber berita yang mendukung Sabdaraja berada di tengah penulisan berita
Skrip	Menekankan pada aspek what yang menjelaskan apa sebenarnya isi Sabdaraja daripada menyampaikan siapa saja yang menolah atau membantah Sabdaraja
Tematik	(1) Sabdaraja atau bisa dibilang (dekrit) Raja, (2) merupakan langkah Kraton untuk menghadapi perubahan zaman dan menjaga eksistensi Kraton, (3) Dawuhraja merupakan petunjuk dari Allah

	SWT dan para leluhur, (4) Sabdaraja dan Dhawuhraja konteksnya cuku tinggi
Retoris	Penggunaan leksikon seperti pada pemberitaan “Sabdaraja atau bisa dibilang (dekrit) Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan penggunaan metafora seperti “Sabdaraja Itu Mutlak” yang digunakan untuk memperkuat Sabdaraja tak terbantahkan

Tabel 3.5

Analisis Sintaksis SKH Harian Jogja

Struktur Sintaksis		
No	Terbit	Headline
1	Sabtu 2 Mei 2015	Sultan Di Nilai Tabrak Adat
2	Sabtu 9 Mei 2015	Saya Menjalankan Perintah Leluhur
3	Minggu 10 Mei 2015	11 Pangeran Kukuh Tolak Sabda Raja
4	Selasa 12 Mei 2015	Buwono Terkunci Keistimewaan
5	Rabu 13 Mei 2015	Sabda Raja Tak Bisa Batal
<i>Lead</i>		
1	Sabtu 2 Mei 2015	Menurut informasi, ada lima point yang di ucapkan Sultan dalam Sabdaraja. Yakni, perubahan gelar Buwono menjadi Bawono. Selain itu, da;am gelar Kasultanan tidak lagi menggunakan Khalifatullah.
2	Sabtu 9 Mei 2015	Dalam jumpa pers yang dilakukan di Kraton Kilen jumat (8/5) Sri Sultan menjelaskan sejumlah masalah termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan melalui Sabda Raja dan pengangkatan GKR pembayun menjadi GKR Mangkubumi melalui Dawuh Raja
3	Minggu 10 Mei 2015	Hasil rapat para Rayi Dalem atau pangeran akan disampaikan secara resmi oleh adik tertua Sultan, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Yudhaningrat mengatakan para Pangeran sudah

		mendengarkan penjelasan Sultan soal Sabdaraja dan Dhawuh raja. Gusti Yudho sapaan akrab GBPH Yudhaningrat sudah memahami Sabda Raja dengan olah pikiran dan hati, namun tetap tidak bisa dipahami.
4	Selasa 12 Mei 2015	Wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat DIY, Arif Noor Hartanto, nama dan gelar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamnegku Buwono X , Sudah Terkunci dengan undang-undang keistimewaan DIY
5	Rabu 13 Mei 2015	Menurut HB X, tak ada aturan yang dilanggar dalam kedua Sabda Raja yang dia keluarkan tersebut. “Batal demi hukm ? Hukum endi ? (hukum yang mana)”. Inikan aturan Kraton bukan aturan konstitusi Republik (Negara Kesatuan Republik Indonesia), “kata sultan, di kepatihan, selasa(12/5).
Latar Informasi		
1	Sabtu 2 Mei 2015	GBPH Yudhaningrat membenarkan lima poin Sabdorojo yang diungkapkan Sultan. Pria yang akrab di sapa oleh Gusti Yudho ini mengatakan perubahan Gelar Sultan bisa merubah semuanya, Bahkan bisa lebih jauh mengubah perjanjian Kratin dengan NKRI,
2	Sabtu 9 Mei 2015	Pada kesempatan kemarin Sri Sultan membacakan secara terbuka isi Sabda raja dan Dhawuh Raja. Inti dari Sabda Raja itu adalah pengumuman bahwa dia mendapat perintah dari Tuhan untuk mengubah namanya
3	Minggu 10 Mei 2015	Kami (11 pangeran) belum bisa memahami, kami yang berjumlah 11 orang teteap menentang, kata Yudhaningrat saat ditemui di kediamannya, sabtu (9/5)
4	Selasa 12 Mei 2015	Sultan sudah mengganti namanya melalui Sabda Raja pada Kamis (30/4) lalu. Dalam Sabda Raja itu, Sultan mengganti Kata Buwono menjadi Bawono. Selain itu Sultan juga menghilangkan Gelar Khalifatullah.
5	Rabu 13 Mei 2015	“Sultan itukan mutlak ,” ujar dia. Sebelumnya, sejumlah rayi dalem (adik-adik Sultan), menolak Sabda Raja dan Dhawuh Raja. Salah satu adik Sultan, GBPH Yudhaningrat, dalam beberapa

		kesempatan menolak penggantian gelar putri sulung Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, yang mungkin menjadi penerus takhta Kraton.
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Sabtu 2 Mei 2015	<p>GBPH Yudhaningrast (adik Sultan)</p> <p>Gelar dan jeneng menyatu ga bisa di pisah-pisah</p> <p>Yang di tabrak adat pokok</p> <p>Akhmad Chariz Zubair (Ketua Dewan Kebudayaan DIY)</p> <p>Secara pribadi saya keberatan dengan perubahan gelar Sultan</p> <p>Bayu Dardias (Dosen Ilmu Politik UGM)</p> <p>Perubahan gelar memiliki efek cukup luas. Salah satunya, undang-undang keistimewaan bisa diamandemen sesuai dengan Sabda Raja</p>
2	Sabtu 9 Mei 2015	<p>Sultan Hamengku Buwono X</p> <p>Jika Raja tidak melaksanakan perintah, resiko yang muncul lebih besar dari yang lain</p> <p>Saya tidak apa apa disepelekan adik-adik dan oraing lain yang tidak tahu sejatinya Sabda Raja dan Dhawuh Raja itu</p>
3	Minggu 10 Mei 2015	<p>GBPH Yudhaningrat (adik tertua Sultan)</p> <p>Kami (11 pangeran) belum bisa memahami, kami yang berjumlah 11 orang teteap menentang</p> <p>Ibarat nya kereta sudah keluar rel yang sudah ada</p>
4	Selasa 12 Mei 2015	<p>GBPH Yudhaningrat (adik Sultan)</p> <p>Silahkan saja warga Jogja dan warga luar Jogja berdemo, asal jangan sampai merusak Kraton</p> <p>Arif Noor Hartanto (Wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat DIY)</p> <p>Karena nama itu sudah terkunci dalam undang-</p>

		undang keistimewaan.
5	Rabu 13 Mei 2015	<p>GBPH Yudhaningrast (adik Sultan)</p> <p>Ibarat nya kereta sudah keluar rel yang sudah ada</p> <p>Jadul Maulana (Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama)</p> <p>Keberatan karena, Sultan membawa –bawa nama leluhur dan tuhan menyangkut persoalan Sabda Raja</p> <p>Sutiyono (Ketua dewan Penasihat Paguyuban Dukuh Gunungkidul Janaloka)</p> <p>Wahyu hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW. “Raja adalah jabatan politik dan adat</p>
Penutup		
1	Sabtu 2 Mei 2015	Perubahan gelar memiliki efdek cukup luas. Salah satunya, undang-undang keistimewaan bisa diamandemen sesuai dengan Sabda Raja
2	Sabtu 9 Mei 2015	Dibagian lain Sultan menyinggung ketika Sri Sultan HB IX masih hidup, dirinya yang di tunjuk untuk melakukan berbagai hal. Termasuk salah satunya membangun petilasan Lampir Gunung Kidul, suatu tempat yang di gunakan oleh Panembahan Senopati bertapa sebelum menjadi Raja
3	Minggu 10 Mei 2015	Sultan mengatakan tidak mudah memang memahami Sabda Raja hanya dengan pikiran, melainkan harus dengan <i>roso</i> (rasa)
4	Selasa 12 Mei 2015	Sejumlah spanduk bertuliskan “kembalikan paugeran , Jogja tetap istimewa” juga ditulis atas nama warga kauman. Gusti Yudha Termasuk kerabat Sultan yang keberatan dengan Sabda Raja dan Dhawuh Raja
5	Rabu 13 Mei 2015	Bisikan leluhur juga sudah sering digunakan di Ngayogyakarta untuk meligistimasi tindakan politik tertentu.pakar sejarah dari ilmu budaya UGM, Sri Margana, mengatakan bahasa simbolik perintah dari tuhan atau bisikan leluhur sesuai dengan pola sejarah tradisi suksesi di Kraton Ngayogyakarta dan Mataram Islam

Dari analisis **sintaksis** di atas, dapat dilihat *frame* dari SKH Harian Jogja yang cenderung menyangkal realisasi Sabda Raja di Kraton Yogyakarta, bisa dilihat dari *headline* yang memberikan kesan ketidaksetujuan atas realisasi Sabda Raja. Struktur sintaksis tersebut mencakup : *Headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup.

Headline yang digunakan SKH Harian Jogja dari kelima berita di atas tidak semuanya secara langsung menyangkal realisasi dari Sabda Raja, ada beberapa yang menggunakan bahasa yang lebih halus, seperti “saya menjalankan perintah leluhur dan Buwono terkunci keistimewaan”, ketiga *headline* lainnya lebih menggunakan bahasa frontal seperti, Sultan di nilai tabrak adat, 11 Pangeran kukuh tolak Sabdaraja, Sabda Raja tak bisa batal”. Berbeda halnya dengan SKH Kedaulatan Rakyat yang terang terangan memberikan pembelaan pada *headline* beritanya. Pada *headline* “Sultan Di Nilai Tabrak Adat” Harian Jogja mencoba menjelaskan kepada masyarakat dan para pembaca bahwa apa yang terkandung di dalam Sabda Raja itu telah menabrak atau keluar jalur dari paugeran Kraton Yogyakarta. Sebenarnya kata ‘menabrak’ yang dipakai oleh Harian Jogja bisa diganti menggunakan kata yang lebih halus, seperti : keluar jalur, melenceng, menyalahi dan lain sebagainya, tetapi disini *frame* dari Harian Jogja adalah menyangkal atau tidak setuju dengan isi Sabda Raja tersebut secara tegas, maka pemilihan kata sangat berparangah dalam *headline* tersebut. Kata di nilai dalam berita ini memiliki makna ajakan kepada masyarakat untuk memberikan pandangan yang negatif pada permasalahan Sabdaraja. Berita Sultan di nilai tabrak adat ini

adalah berita pertama dari Harian Jogja yang membahas tentang Sabdaraja, selain ingin menginformasikan bahwa Sabda Raja itu menabrak adat Harian Jogja juga ingin memberikan kesan negatif kepada Sabda Raja ini dari awal.

Sementara *headline* “Saya Menjalankan Perintah Leluhur” lebih cenderung bagaimana proses awal mula terjadinya Sabdaraja yang di lontarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam headline ini Harian Jogja tidak memunculkan penyangkalan nya sama sekali. Pada *headline* ketiga SKH harian Jogja sangat jelas memberikan bantahan mengenai Sabdaraja dengan headline “11 Pangeran Kukuh Tolak Sabda Raja”, *headline* ini sekaligus memberikan dukungan kepada berita pada tanggal 2 Mei 2015 mengenai “Sultan Di Nilai Tabrak Adat”. Pada *headline* ini Harian Jogja ingin menampilkan Sabda Raja dari prespektif para 11 Pangeran atau para adik-adik sultan yang tidak menyetujui Sabdaraja. Sangat jelas terlihat kata “Tolak” pada headline berita kali ini menggambarkan bagai mana Harian Jogja tidak menyetujui Sabdaraja yang di ucapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pada *headline* ke empat Harian Jogja menggunakan headline “Buwono Terkunci Keistimewaan” bertujuan menginformasikan bahwa pergantian nama yang ada di dalam Sabdaraja tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan nama Buwono terikat dengan undang-undang keistimewaan (UUK) yang di berikan Republik Indonesia kepada Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa, jika pergantian nama tetap dipaksakan maka akan berdampak pada keistimewaan Yogyakarta yang di berikan oleh Republik Indonesia. Pada *headline* kelima ini Harian Jogja menggunakan “Sabda Raja Tak Bisa Batal”, disini Harian Jogja menggambarkan sosok Sultan yang keras

kepala terhadap keinginan nya untuk melaksanakan Sabda Raja yang telah menimbulkan pro-kontra di kalangan internal maupun eksternal Kraton Yogyakarta. Kata “Tak Bisa” batal pada *headline* mempertegas bahwa keinginan sultan ini harus terlaksana apapun resiko yang akan di timbulkan tanpa memikirkan kalangan lain di Pugeran Kraton Yogyakarta.

Dari struktur *lead* dalam kelima berita SKH Harian Jogja semuanya memiliki inti yang sama, yaitu penyangkalan mengenai Sabdaraja, tetapi penggunaan bahasa yang dipakai tidak terlalu frontal seperti headline yang digunakan oleh Harian Jogja, kelima lead tersebut bisa dilihat sebagai berikut :

Menurut informasi, ada lima point yang di ucapkan Sultan dalam Sabdaraja. Yakni, perubahan gelar Buwono menjadi Bawono. Selain itu, dalam gelar Kasultanan tidak lagi menggunakan Khalifatullah (Sabtu 2 mei 2015).

Dalam jumpa pers yang dilakukan di Kraton Kilen jumat (8/5) Sri Sultan menjelaskan sejumlah masalah termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan melalui Sabda Raja dan pengangkatan GKR pembayun menjadi GKR Mangkubumi melalui Dawuh Raja(Sabtu 9 mei 2015).

Hasil rapat para Rayi Dalem atau pangeran akan disampaikan secara resmi oleh adik tertua Sultan, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Yudhaningrat mengatakan para Pangeran sudah mendengarkan penjelasan Sultan soal Sabdaraja dan Dhawuh raja. Gusti Yudho sapaan akrab GPbh Yudhaningrat sudah memahami Sabda Raja dengan olah pikiran dan hati, namun tetap tidak bisa dipahami(Minggu 10 mei 2015).

Wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat DIY, Arif Noor Hartanto, nama dan gelar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamnegku Buwono X , Sudah Terkunci dengan undang-undang keistimewaan DIY(Selasa 12 mei 2015)

Menurut HB X, tak ada aturan yang dilanggar dalam kedua Sabda Raja yang dia keluarkan tersebut. “Batal demi hukm ? Hukum endi ? (hukum yang mana)”. Inikan aturan Kraton bukan aturan konstitusi Republik (Negara Kesatuan Republik Indonesia), “kata sultan, di kepatihan, selasa(12/5) (Rabu 13 mei 2015).

Lead pertama mencoba menggambarkan sedikit mengenai isi dari Sabda Raja, tetapi yang disajikan tidak isi sepenuhnya mengenai Sabda Raja melainkan 2 poin Sabda Raja yang digunakan sebagai *lead*. Kedua poin dari Sabda Raja yang dijadikan *lead* tersebut adalah yang sangat menimbulkan pro-kontra di kalangan internal Kraton Yogyakarta sendiri. Secara tidak langsung Harian Jogja ingin menampilkan bahwa 2 poin tersebut adalah sumber dari permasalahan yang menimbulkan pro-kontra di dalam kalangan Kraton mau pun eksternal Kraton.

Dalam *lead* kedua yang menggunakan kutipan langsung dari Sri Sultan HB X ini secara tidak langsung Harian Jogja ingin menyampaikan kepada masyarakat dan pembaca bahwa Sabda Raja yang diucapkan Sultan ini hanya menimbulkan masalah di kalangan Kraton maupun di luar Kraton, bahkan Sultan sendiripun mengakui dengan Sabdaraja ini pasti akan menjadi masalah. Ini tergambarkan dengan Harian Jogja menuliskan kata “sejumlah masalah” yang berada di dalam *lead* berita. Tetapi disini Harian Jogja tidak mengutarakan nya secara langsung melainkan menggunakan tata bahasa yang halus.

Dalam *lead* ketiga yang menggunakan sumber berita dari GBPH Yudhaningrat ini, di *lead* kali ini Harian Jogja memberikan prespektif dari kalangan adik-adik sultan. Harian Jogja mencoba menyampaikan kepada masyarakat dan pembaca bahwa Sabda Raja tetap tidak bisa dipahami, walaupun memahami menggunakan pikiran dan hati. Dengan kata “tidak bisa memahami” Harian Jogja ingin mengutarakan bagaimana kita bisa menyetujui Sabda Raja ataupun mendukung sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak bisa memahaminya.

Dalam memahami suatu keputusan sangatlah penting, apalagi jika terkait dengan perintah langsung dari seorang Raja di Kerajaan tertentu.

Dalam *lead* ke empat yang menggunakan sumber dari Wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Arif Noor Hartanto, Harian Jogja mencoba menyampaikan kepada masyarakat dan pembaca bahwa pergantian nama yang ada di dalam isi Sabda Raja ini tidak bisa dilakukan, dikarenakan nama dan gelar Gubernur DIY ini sudah ditetapkan dalam undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Dengan terkuncinya nama dan jabatan Gubernur DIY ini maka Sabda Raja tidak akan berlaku atau berlaku dengan resiko terhapusnya keistimewaan Yogyakarta.

Sementara pada *lead* terakhir yaitu kelima Harian Jogja menggunakan kutipan langsung dari Sri Sultan Hamnegku Buwono X, dalam *lead* ini Harian Jogja ingin mengutarakan bahwa Sultan tetap ingin bersikukuh merealisasikan Sabda Raja tanpa menghiraukan undang-undang keistimewaan yang diberikan Republik Indonesia kepada Yogyakarta, dengan kata lain Sultan hanya mementingkan kepentingan sendiri (realisasi Sabda Raja) tanpa menghiraukan resiko yang akan dihadapi Kraton Yogyakarta ataupun Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri.

Perangkat Sintaktis selanjut nya adalah **latar informasi**, dari latar informasi kelima berita diatas mencoba memberikan informasi informasi tambahan yang dapat memperkuat frame penyangkalan Sabdaraja dari SKH

Harian Jogja, bahwa memang Sabdaraja banyak menimbulkan masalah, seperti pada latar informasi berikut :

GBPH Yudhaningrat membenarkan lima poin Sabdorjo yang diungkapkan Sultan. Pria yang akrab di sapa oleh Gusti Yudho ini mengatakan perubahan Gelar Sultan bisa merubah semuanya, Bahkan bisa lebih jauh mengubah perjanjian Kraton dengan NKRI (Sabtu 2 mei 2015)

Kami (11 pangeran) belum bisa memahami, kami yang berjumlah 11 orang teteap menentang, kata Yudhaningrat saat ditemui di kediamannya, sabtu (9/5) (Minggu 10 mei 2015)

Dalam kedua paragraf di atas Harian Jogja mencoba memberikan gambaran ketidak setujuan nya melalui prespektif para pangeran atau 11 adik sultan. Dari latar informasi ini Harian Jogja Secara tidak langsung menyangkal akan realisasi Sabdaraja yang di ucapkan oleh Sultan Sri Hamengku Buwono X, dikarenakan Sabdaraja bisa mengubah perjanjian Kraton dengan NKRI dan menyebabkan hilang nya keistimewaan Yogyakarta.

Penggunaan **sumber berita**, kutipan dan pernyataan dalam lima berita di atas SKH Harian Jogja mengambil dari perseorangan dan disusun untuk memperkuat frame dari Harian Jogja sendiri yang menyangkal realisasi Sabdaraja, bahkan kutipan dari Sultan pun dipilih untuk memperkuat penyangkalan Sabdaraja itu sendiri. Berbedahal nya dengan Kedaulatan Rakyat yang menggunak sumber, kutipan untuk membela Sabdaraja. Berikut ini daftar sumber dari SKH Harian Jogja :

a. GBPH Yudhaningrast (adik Sultan)

- Gelar dan jeneng menyatu ga bisa di pisah-pisah
- Yang di tabrak adat pokok

- Kami (11 pangeran) belum bisa memahami, kami yang berjumlah 11 orang tetep menentang
 - Ibarat nya kereta sudah keluar rel yang sudah ada
 - Silahkan saja warga Jogja dan warga luar Jogja berdemo, asal jangan sampai merusak Kraton
- b. Akhmad Chariz Zubair (Ketua Dewan Kebudayaan DIY)
- Secara pribadi saya keberatan dengan perubahan gelar Sultan
- c. Bayu Dardias (Dosen Ilmu Politik UGM)
- Perubahan gelar memiliki efek cukup luas. Salah satunya, undang-undang keistimewaan bisa diamandemen sesuai dengan Sabda Raja
- d. Arif Noor Hartanto (Wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat DIY)
- Karena nama itu sudah terkunci dalam undang-undang keistimewaan
- e. Jadul Maulana (Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama)
- Keberatan karena, Sultan membawa –bawa nama leluhur dan tuhan menyangkut persoalan Sabda Raja
- f. Sutiyono (Ketua dewan Penasihat Paguyuban Dukuh Gunungkidul Janaloka)
- Wahyu hanya dimiliki Nabi Muhammad SAW. “Raja adalah jabatan politik dan adat.
- g. Sultan Hamengku Buwono X
- Jika Raja tidak melaksanakan perintah, resiko yang muncul lebih besar dari yang lain
 - Saya tidak apa apa disepelkan adik-adik dan oraing lain yang tidak tahu sejarinya Sabda Raja dan Dhawuh Raja itu

Dari semua sumber berita, kutipan dan pernyataan dalam lima berita tersebut terlihat bagaimana Harian Jogja menggunakan hampir semua sumber yang tidak menyetujui akan realisasi sabdaraja, bahkan kutipan langsung dari Sultan digunakan untuk memperkuat *frame* dari Harian Jogja itu sendiri. Seperti

dikatakan oleh Sultan “Jika Raja tidak melaksanakan perintah, resiko yang muncul lebih besar dari yang lain” disini Harian Jogja memiliki maksud lain dengan menuliskan kutipan langsung dari Sultan, Harian Jogja memaknai kata-kata Sultan bahwa Sultan tidak mau menerima resiko yang besar bagi kelangsungan dan kedamaian di DIY ini, sultan lebih memilih akan adanya konflik dan sebagainya untuk menghindarkan dirinya dari resiko yang besar itu. Sebagaimana di ketahui media massa memilih realitas mana yang akan di ambil dan mana yang tidak di ambil. Selain itu, secara sadar atau tidak sadar, media massa juga memilih aktor yang di jadikan sumber berita, sehingga hanya sebagian saja dari sumber berita yang tampil dalam pemberitaan (Eriyanto : 2002 : 22-24)

Dari **penutup** kelima berita SKH Harian Jogja tidak semuanya memberikan kesan penolakan kepada Sabdaraja, kedua penutup berita tersebut secara jelas mengutaran penolakannya terhadap Sabdaraja, dan ketiga penutup berita lainnya hanya sebagai pendukung atau pelengkap sebuah berita yang berisi hal-hal tidak penting, berikut dua berita yang secara jelas mengutarakan ketidaksetujuan realisasi Sabda Raja :

Sejumlah spanduk bertuliskan “kembalikan paugeran , Jogja tetap istimewa” juga ditulis atas nama warga kauman. Gusti Yudha Termasuk kerabat Sultan yang keberatan dengan Sabda Raja dan Dhawuh Raja (Selasa 12 mei 2015)

Bisikan leluhur juga sudah sering digunakan di Ngayogyakarta untuk meligitimasi tindakan politik tertentu.pakar sejarah dari ilmu budaya UGM, Sri Margana, mengatakan bahasa simbolik perintah dari tuhan atau bisikan leluhur sesuai dengan pola sejarah tradisi suksesi di Kraton Ngayogyakarta dan Mataram Islam (Rabu 13 mei 2015)

Dari penutup berita diatas bisa dilihat penutup berita pertama sangat jelas mengemukakan ketidak setujuan para masyarakat Kauman akan Sabdaraja dengan menuliskan spanduk di berbagai tempat dan pernyataan Harian Jogja melalui Kutipan dari Gusti Yudhaningrat yang termasuk kerabat Sultan. Pada penutup kedua Harian Jogja mengutarakan bahwa kata-kata bisikan leluhur adalah sebagai legitimasi tindakan politik dimana bahasa seperti itu sudah dipakai sejak Kerajaan Mataram Islam, dengan kata lain itu hanyalah sebuah gambaran tidak langsung untuk memperkuat keinginan Sultan dalam suksesi Ssabdaraja.

Dari unsur **Skrip** Harian Jogja lebih banyak menggunakan sumber dan kutipan dari narasumber. Unsur kelengkapan berita Harian Jogja lebih mengutamakan *why* daripada *how*, sementara unsur *when* and *where* tidak semuanya ada pada sumber yang di wawancarai (*who*), hala ini memperlihatkan Harian Jogja melakukan wawancara secara acak kemudian disusun ulang dalam skema berita kemudian dipilih yang mana yang akan didahulukan dalam paragraf awal untuk menguatkan unsur *what* yang mewakili frame Harian Jogja. Unsur *what* dalam berita Harian Jogja adalah alasan menyangkal Sabdaraja Sultan Hamnegku Buwono X.

Unsur **tematik** dari kelima berita diatas secara umum adalah penyangkalan dari berbagai kalangan terhadap Sadarajayang diperkuat dari pendapat para narasumber berita Harian Jogja, sebagian pendapat tentang Sabda Raja tidak disampaikan secara terang terangan melainkan dengan penjelasan-penjelasan logis tentang sebab-akibat dari Sabda Raja. Pendapat tersevut di antaranya adalah : Gelar dan jeneng menyatu ga bisa di pisah-pisah, Yang di tabrak adat pokok,

Kami (11 pangeran) belum bisa memahami, kami yang berjumlah 11 orang tetap menentang, Ibarat nya kereta sudah keluar rel yang sudah ada, Silahkan saja warga Jogja dan warga luar Jogja berdemo, asal jangan sampai merusak Kraton, Secara pribadi saya keberatan dengan perubahan gelar Sultan. Semua argumentasi diatas disusun oleh wartawan untuk mengajak para pembaca melihat Sabdaraja adalah sebagai sesuatu yang kurang baik dan menimbulkan berbagai masalah, resiko, dan akibat. Cara Harian Jogja menyusun berita juga bisa dilihat dari paragraf yang di susun dari paragraf awal sampai akhir berita dalam kelima berita tersebut tidak ada dukungan terhadap Sabdaraja , hal ini menunjukkan bahwa Harian Jogja membatasi tema pada berita tersebut hanya pada kelompok maupun perseorang yang menolok realisasi Sabdaraja.

Dari unsur tematik elemen lain yang bisa diamati adalah koherensi, dalam kelima berita diatas dapat di temukan koherensi sebagai berikut :

1. perubahan Gelar Sultan bisa merubah semuanya, **bahkan** bisa lebih jauh mengubah perjanjian Kraton dengan NKRI (Sabtu 2 mei 2015)
2. Inti dari Sabda Raja itu adalah pengumuman **bahwa** dia mendapat perintah dari Tuhan untuk mengubah namanya
3. kami yang berjumlah 11 orang **tetap** menentang
4. Dalam Sabda Raja itu, Sultan mengganti Kata Buwono menjadi Bawono **Selain itu** Sultan juga menghilangkan Gelar Khalifatullah
5. Sebelumnya, sejumlah rayi dalem (adik-adik Sultan), menolak Sabda Raja **dan** Dhawuh Raja.

Dalam poin pertama terdapat koherensi penekanan dengan kata “bahkan”, koherensi ini menekankan pada akibat yang akan di timbulkan dari Sabda Raja yang memiliki dampak luas, salah satunya adalah perjanjian Kraton

dengan NKRI yang terkandung dalam Undang-undang keistimewaan (UUK) DIY dan memiliki dampak tercabut nya keistimewaan Yogyakarta, poin kedua menggunakan koherensi penjas dengan kata “bahwa” koherensi ini memperjelas kalimat sebelumnya bahwa Sabda Raja adalah perintah dari Tuhan atau pemberian dari tuhan bukanlah kehendak diri sendiri, dilain sisi Sultan adalah seseorang yang menganut agama Islam, dimana perintah Tuhan atau bisa disebut Wahyu Tuhan hanyalah di berikan kepada Nabi-nabi nya, bukanlah kepada orang biasa sekalipun itu seorang Sultan, seperti yang tercatat dalam Al-Quran “Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana” (Surat Asy-Syura Ayat 51). Poin ketiga menggunakan koherensi penekanan dengan menggunakan kata “tetap” koherensi ini ingin memperkuat *frame* Harian Jogja yang juga tetap menolak realisasi Sabda raja dengan menggunakan prespektif dari sikap adik-adik sultan yang tetap menolak Sabda Raja, dengan menggunakan kata tetap ini Harian Jogja juga ingin menghimbau kepada masyarakat Yogyakarta maupun pembaca agar tetap pada pendirian nya untuk menolak realisasi Sabda Raja, poin ke empat menggunakan koherensi aditif atau penambahan dengan menggunakan kata “selain itu” koherensi ini menjelaskan bukan hanya mengganti nama saja tetapi sultan menghilangkan gelar Khalifatullah, poin kelima menggunakan koherensi penjas dengan kata penghubung “dan” koherensi ini memper jelas sikap adik-adik sultan tidak

Sabdaraja saja yang ditolak melainkan Dhawuhraja juga. Koherensi sendiri adalah Koherensi adalah pengaturan secara rap kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya menurut (Wohl, 1978 : 25).

Perangkat *framing* selanjut nya adalah **retoris**, dari kelima berita tersebut ada beberapa penekanan yang di pakai lewat susunan kalimat, dan kata. Misal nya kata yang dipakai ‘tabrak’ dan ‘kereta’ kata tersebut memberikan penekaknan tertentu pada suatu kalimat.

... Yang di **tabrak** adat pokok (Sabtu 2 mei 2015)

... Sabdaraja yang di ucapkan Sultan **cacat** hukum (2 Mei 2015)

... jika perempuan menjadi Raja, **Mahzabnya** ikut suami (13 Mei 2015)

Kata ‘tabrak’ sebenar nya memiliki arti langgar, bentur, kata tabrak ini di gunakan oleh Gusti Yudhaningrat dalam meberikan opini mengenai Sabdaraja kepada Harian Jogja dan disajikan secara langsung oleh Harian Jogja, ini menggambarkan bagai mana Harian Jogja sangat menyangkal realisasi Sabda Raja dengan pengungkapan secara langsung dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan Sabda Raja. Kata tabrak sendiri memiliki arti langgar, bentur (KBBI 1991:987). Kata ‘cacat’ sebenar nya memiliki arti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (<http://kbbi.web.id/cacat>), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga cacat di artikan kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna pada benda , batin, akhlak (KBBI 1991:164), tetapi oleh Harian Jogja kata ‘cacat’ tetap dipakai untuk sebuah pemberitaan mengenai perkatan atau perintah seorang Sultan atau

raja, sebenarnya kata cacat disini bisa di ganti menggunakan kata ‘kurang sesuai’, ‘keluar dari’, dan lain sebagainya tetapi ini lah bentuk penyangkalan dari Harian Jogja terhadap Sabdaraja. Kata terakhir adalah ‘Mahzab’ adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Dalam kata diatas di pakai sebagai kata ganti untuk kata mengikuti suaminya. Lain halnya dengan arti mazhab yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kamus tersebut mengartikan mazhab adalah haluan atau aliran dalam ilmu fiqih yang menjadi hukum kuat dalam Islam (KBBI 1991:640).

Tabel 3.6

Frame Harian Jogja : Penyangkalan terhadap Sabdaraja

Elemen	Strategi Penulisan
Sintaksis	Dari semua narasumber yang diwawancarai di atas tidak ada narasumber yang mendukung Sabdaraja. Pendapat dari narasumber yang dipakai disusun dan diuraikan panjang lebar serta dengan porsi yang lebih besar untuk memperkuat <i>frame</i> Harian Jogja tentang penyangkalan Sabdaraja
Skrip	Menekaskan pada aspek <i>why</i> dan <i>who</i> yang menjelaskan tentang (<i>What</i>) penolkan dari berbagai kalangan terhadap Sabdaraja. Sementara aspek dimana dan kapan diwawancarnya sumber berita tidak semuanya disertakan.
Tematik	(1)Perubahan Gelar Sultan bisa merubah semuanya, Bahkan bisa lebih jauh mengubah perjanjian Kratin dengan NKRI, (2) Kami (11 pangeran) belum bisa memahami, kami yang berjumlah 11 orang tetap menentang, kata Yudhaningrat, (3) Sri Sultan menjelaskan sejumlah masalah termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan melalui Sabda Raja dan pengangkatan GKR pembayun menjadi GKR Mangkubumi melalui Dawuh Raja(4) akrab GPBH Yudhaningrat sudah memahami Sabda Raja dengan olah pikiran dan hati, namun

	tetap tidak bisa dipahami(5) , GBPH Yudhaningrat, dalam beberapa kesempatan menolak penggantian gelar putri sulung Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi
Retoris	Penggunaan leksikon dalam penekanan kata seperti, ‘tabrak’, ‘cacat’, sebagai bukti penyangkalan terhadap Sabdaraja. Dan kata mahzab di gunakan bahwa Kraton Yogyakarta adalah sebagian dari Kerajaan islam.

2. Penerus tahta vs Perampas Tahta Kraton Jogja

Pada sub bab ini peneliti menemukn beberapa berita seputar penerus tahta dan perampas tahta Kraton Yogyakarta yang di beritakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Pemberitaasn Seputar Penerus dan Perampas Tahta Kraton Yogyakarta

Koran	No	Hari/Tanggal Terbit	Judul Berita
Kedaulatan Rakyat	1	6 Mei 2015	GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi
Harian Jogja	1	6 Mei 2015	Pembayun Calon Ratu

Berikut analisis Sintaksis peneliti mengenai pemberitaan penerus tahta Kraton Yogyakarta pada SKH Kedaulatan Rakyat, bisa dilihat sebgai berikut :

Tabel 3.8

Pemberitaasn Seputar Penerus Tahta Kraton Yogyakarta

Analisis Sintaksis		
No	Terbit	Headline (judul)
1	6 Mei 2015	GKR Pembayaran menjadi GKR Mangkubumi
Lead		
1	6 Mei 2015	Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali mengeluarkan Sabdaraja pada Selasa Wage (5/5) di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta. Sabdaraja kali ini dikeluarkan bersamaan weton HB X yang jatuh pada Selasa Wage, berisi pengangkatan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) pembayaran menjadi putri mahkota yang kemudian namanya berubah menjadi GKR mangkubumi
Latar Informasi		
1	6 Mei 2015	Berdasarkan keterangan yang di himpun KR, prosesi Sabdaraja dimulai pukul 10.40. seperti Sabdaraja sebelumnya, kali ini Sultan juga memakai pakaian kebesaran seorang raja atau biasa disebut keprabon. Sebelum mengucapkan Sabdaraja Sultan sempat melakukan meditasi selama 2 menit. Dengan posisi duduk di dampar kencana.
Kutipan, sumber, Pernyataan		
1	6 Mei 2015	M Jazir AS (Budayawan) GKR Mangkubumi artinya calon raja, Hamemayu Hayunign Bawono artinya bertugas memakmurkan dan mensejahterakan dunia, langgeng ing Mataram artinya abadi untuk dinasti Mataram
Penutup		
1	6 Mei 2015	Pangangeng Pawedan Hageng Punokawan Kraton Yogyakarta sudah meminta diadakan rapat keluarga pada Rabu (6/5) untuk membicarakan hal tersebut. Gusti Prabu juga meminta masyarakat DIY untuk

		mengingatn Sultan HB X
--	--	------------------------

Dari analisis **sintaksis** di atas, dapat dilihat mengenai *frame* Kedaulatan Rakyat yang menginformasikan bahwa sabdaraja kedua atau bisa disebut Dhawuh Raja telah di keluarkan pada selesa 5 Mei 2015 oleh Sri Sultan Hamnegku Buwono X yang berisikan penggantian nama GKR pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Struktur sintaksis tersebut mencakup : *headline*, *lead*, latar informasi, sumber, kutipan, pernyataan, penutup.

Dari **headline** Kedaulatan Rakyat yang memberikan pernyataan perubahan nama sebagai headline berita memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat DIY mau pun di luar DIY bahwa pergantian nama Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang diberikan oleh Sultan Sri Hamengku Buwono X sudah dilaksanakan di dalam Siti Hingil Kraton, dan pemberian nama itu bertujuan untuk pengangkatan Pembayun sebgai Ratu kasultana Yogyakarta.

Dari **lead** berita di atas bisa di lihat bagaimana Kedaulatan Rakyat sangat ingin informatif dalam pergantian nama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi, dengan mencantumkan persamaan kelahiran Sultan Hamnegku Buwono X dengan kejadian Dhawuhraja ini. selain itu Kedaulatan Rakyat sangat jelas menginformasikan dimana proses Sabdaraja kedua ini di laksanakan, itu sangat meyakinkan bahwa Kedaulatan Rakyat benar benar ingin memberikan gambaran jelas kepada masyarakat DIY agar tidak terjadi pro-kontra dalam Sabdaraja yang kedua ini.

Latar informasi yang ditampilkan dalam berita di atas adalah, mengenai proses pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi oleh Sultan, disini Kedaulatan Rakyat ingin memperkuat frame nya yang informatif itu dengan menjelaskan prosesi Sabdaraja yang kedua dengan sangat jelas, terbukti dengan memberikan gambaran disaat Sultan bermeditasi selama 2 menit di dampar kencana Kraton Yogyakarta dan memberikan citra yang sangat sakral pada Sabdaraja yang kedua ini dengan menjelaskan pakaian kebesaran sultan Keprabon yang di pakainya.

Dari **kutipan, sumber, pernyataan** yang ada pada berita di atas, Kedaulatan menggunakan seorang Budayawan Yogyakarta M Jazir AS, pada pernyataan nya M Jazir menjelaskan secara detail apa makna dari nama baru GKR Mangkubumi, penjelasan tersebut bisa dilihat sebagai berikut :

GKR Mangkubumi artinya calon raja, Hamemayu Hayunign Bawono artinya bertugas memakmurkan dan mensejahterakan dunia, langgeng ing Mataram artinya abadi untuk dinasti Mataram

Kedaulatan Rakyat memiliki tujuan agar masyarakat tidak menyalah artikan nama baru GKR Mangkubumi ini, dan tentunya untuk meminimalisir pro-kontra yang akan terjadi di kalangan masyarakat Yogyakarta.

Pada **penutup berita** Kedaulatan Rakyat sedikit menyajikan kondisi Pangangeng Pawedan Hageng Punokawan Kraton Yogyakarta yang ingin melakukan rapat keluarga untuk membahas Dhawuhraja dan Gusti Prabu juga meminta masyarakat DIY untuk mengingatkan Sultan HB X. Penutup disini hanya sebagai pelangkpa berita dari frame Kadaulatan Rakyat yang ingin

informatif jadi mereka tetap memberikan kondisi situasi dari sisi lain Kratonmeskipun sebenarnya penutup berita ini tidak terlalu bersinabung dengan inti pembahasan berita.

Unsur **skrip** yang ada pada berita ini sangat mendukung frame Kedaulatan Rakyat untuk menginformasikan Sabdaraja yang kedua atau Dhawuhraja kepada masyarakat. Bisa dilihat dari unsur 5W+1H dari berita ini, *what* sebagai apa isi sebenarnya Dhawuhraja yang diucapkan kan Sultan Hamnegku Buwono X, serta *where* tempat penyampaian Dawuhraja di Siti Hinggil Keraton, unsur *who* menjelaskan GKR Pembayun berubah nama menjadi GKR Mangkubuni, *when* kejadian di tulis jelas oleh Kedaulatan Rakyat terjadi pada Selasa 5 mei 2015, tetapi unsur *why* dan *how* kurang di jelaskan pada berita ini

Dalam unsur **tematik** secara umum berita diatas memiliki tema penerus tahta Kraton Yogyakarta , hal ini bisa di tandai dengan penggunaan headline berita yang sangat jelas memaparkan pergantian nama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Cara lain untuk melihat tema dalam berita adalah koherensi yang dipakai dalam menyambung antara kalimat atau proposisi, dari berita tersebut ada beberapa koherensi yang di pakai di antaranya :

- a. Sabdaraja **kali ini** dikeluarkan bersamaan weton HB X yang jatuh pada selasa wage
- b. Seperti Sabdaraja sebelum nya, kali ini Sultan **juga** memakai pakaian kebesaran seorang raja atau biasa disebut keprabon.
- c. Gusti Prabu **juga** meminta masyarakat DIY untuk mengingatkan Sultan HB X

poin pertama menggunakan koherensi penekanan ditandai dengan kata ‘kali ini’ kalimat tersebut mencoba memberi penjelasan bahwa Sabdaraj kedua atau Dhawuh raja dikeluarkan saat hari kelahiran Sultan Hamnegku Buwono X. Poin kedua menggunakan koherensi *aditif* atau penambahan ditandai dengan kata ‘juga’ kalimat tersebut mencoba menjelaskan saat terjadinya Dhawuhraja Sultan mengenakan pakaian kebesarannya. Poin ketiga menggunakan koherensi *aditif* atau penambahan kalimat tersebut mencoba menjelaskan Gusti Prabu meminta bantuan kepada masyarakat untuk kembali mengingatkan Sultan dalam Sabdaraja kedua.

unsur **retoris** yang dipakai dalam berita ini adalah leksikon, beberapa kata dipakai untuk menekankan makna tertentu seperti kata ‘penobatan’ dalam kalimat berikut :

GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi ini merupakan **penobatan** putri mahkota atau penerus tahta Kraton Yogyakarta (terbit 6 Mei 2015)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata penobatan bisa berarti proses, cara, perbuatan (KBBI 1991:691), pemilihan kata penobatan dipakai untuk menunjukkan bahwa pengangkatan Pembayun sebagai putri mahkota sudah di kukuhkan, tetapkan dan tidak bisa di ubah ubah lagi.

Tabel 3.9

**Frame Kedaulatan Rakyat Seputar Penerus Tahta Kraton
Yogyakarta**

Elemen	Strategi Penulisan
Sintaksis	Bersifat secara informatif dengan mengungkapkan secara jelas dan mendetail kejadian Dhawuh raja, sumber yang digunakan juga memberikan kutipan yang informatif dengan menjelaskan makna pergantian nama GKR Pembayun. Di kahir paragraf sedikit mengisahkan pro-kotra yang terjadi akibat Sabdaraja pertama
Skrip	Lebih menekankan prosesi berjalan nya Sabdaraja kedua atau Dhawuhraja, tetapi unsur <i>why</i> dan <i>how</i> kurang jelas dalam pemberitaan
Tematik	(1) Sabdaraja kali ini dikeluarkan bersamaan weton HB X yang jatuh pada selasa wage(2) Seperti Sabdaraja sebelum nya, kali ini Sultan juga memakai pakaian kebesaran seorang raja atau biasa disebut keprabon(3) Gusti Prabu juga meminta masyarakat DIY untuk mengingatkan Sultan HB X
Retoris	Penggunaan leksikon dalam penekanan kata penobatan.

Tabel 3.10

Pemberitaasn Seputar Perampas Tahta Kraton Yogyakarta

Analisis Sintaksis		
No	Terbit	Headline (judul)
1	6 Mei 2015	Pembayun Calon Ratu
Lead		
1	6 Mei 2015	Persiapan Pembayun menjadi Putri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta ini dikukuhkan melalui proses Dhawuh Raja yang di gelar secara tertutup di

		Siti Hinggil, Kompleks Kraton, Selasa (5/5).
Latar Informasi		
1	6 Mei 2015	Dalam prosesi Dhawuh Raja tersebut, Sultan mengganti gelar Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Prosesi Dhawuh Raja hanya berlangsung selama 20menit. Sultan datang ke Siti Hinggil bersama permaisuri GKR Emas dari kediaman nya di Kraton Kilen sekita pukul 10.50 WIB. Sultan mengenakan pakaian kebesaran Raja Kraton.
Kutipan, sumber, Pernyataan		
1	6 Mei 2015	<p>Sumber Harian Jogja (menirukan Sultan)</p> <p>‘Penerusku kudu pancerku dewe’</p> <p>Otomatis sebagai putri mahkota</p> <p>Raden Wedono Ngabdul Sada (Panepen Masjid Kraton)</p> <p>Ngeresmiken gelar Pembayun dados GKR Mangkubumi</p> <p>Sri Margana (Sejarawan Universita Gajah Mada)</p> <p>Namun dari prespektif budaya agak di sayangkan kalau gelar itu di tinggal sekalipun fungsinya simbolik</p> <p>Jadi ada tidak nya gelar Khalifatullah itu pengaruh nya secara praktis dalam keagamaan.</p>
Penutup		
1	6 Mei 2015	Ketika di tanyakan apakah nama atau gelar Mangkubumi itu identik dengan putra mahkota, Sri Margana mengatakan gelar Mangkubumi tidak selalu diberikan untuk putra Mahkota.

Dari analisis **sintaksis** di atas, dapat dilihat mengenai *frame* Harian Jogja yang menuduh Pembayun sebagai perebut tahta ratu Kraton Yogyakarta, perebut yang di maksud adalah ketika seorang Raja tidak memiliki seorang putra atau anak lelaki maka Gelar Sultan akan Jatuh ke adik-adik nya, tetapi dengan berbagai cara Sultan akan memberikan Gelar nya kepada Pembayun melalui Dhawuh Raja ini.

Dari *headline* Harian Jogja yang menegaskan Pembayun Calon Ratu ini bertujuan menuduh bahwa Pembayunlah yang akan meneruskan Gelar Sultan atau putri Mahkota selagi Sultan HB X masih menjabat, berbeda dengan Kedaulatan Rakyat yang informatif dengan menggunakan *headline* pergantian nama Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Dari *lead* tersebut Harian Jogja menguatkan tuduhan nya dengan menggunakan kata ‘Persiapan pembayun menjadi putri mahkota’. Dengan awal paragraf seperti itu Harian Jogja ingin memberikan gambaran bahwa sekarang ini Pembayunlah Ratunya atau penerus tahta keraton, bukan lagi adik-adik sultan yang akan meneruskan Gelar Sultan berikutnya.

Latar informasi yang disajikan oleh Harian Jogja menguatkan *lead* mereka dengan menjelaskan isi Dhawuh Raja adalah pergantian nama GKR Pembayun Menjadi GKR Mangkubumi yang identik dengan pengangkatan pembayun sebagai putri mahkota penerus tahta Kraton Yogyakarta, dan pada latar informasi ini Harian Jogja hanya sedikit memberikan informasi mengenai proses Dawuh Raja berbeda dengan Kedaulata Rakyat yang mengisahkan secara hampir

menyeluruh mengenai prosesi Dawuh Raja. Terbukti dengan Harian Jogja tidak menyebutkan nama pakian kebesaran sultan salah satunya.

Dari **kutipan, sumber, pernyataan** yang ada pada berita di atas, Harian Jogjamenggunakan dari berbagai kalangan, ada Dosen UGM, Sultan sendiri, dan Abdi Dalem yang tidak disebutkan namanya. Berikut kutipan, sumber, maupun pernyataan yang disajikan Harian Jogja :

- a. Sumber Harian Jogja (menirukan Sultan)

‘Penerusku kudu pancerku dewe’

Otomatis sebagai putri mahkota

- b. Raden Wedono Ngabdul Sada (Panepen Masjid Kraton)

Ngeresmiken gelar Pembayun dados GKR Mangkubumi

- c. Sri Margana (Sejarawan Universita Gadjah Mada)

Namun dari prespektif budaya agak di sayangkan kalau gelar itu di tinggal sekalipun fungsinya simbolik

Jadi ada tidak nya gelar Khalifatullah itu pengaruh nya secara praktis dalam keagamaan.

Dari semua kutipan, sumber, maupun pernyataan yang disajikan Harian Jogja dua di antara nya memberikan pernyataan bahwa GKR Pemabyun akan menjadi putri mahkota, dan satu pernyataan dari Sri Margana, menyinggung tentang Sabdaraja yang pertama.

Penutup dari berita Harian Jogja menyajikan pertanyaan kepada Sri Margana tentang sedikit makna kata Mangkubumi. Maksud dari pertanyaan ini adalah memberikan sedikit pengetahuan kepada para pembaca tentang makna dari kata Mangkubimi yang di berikan kepada GKR Pembayun. Seperti pada

umumnya penutup berita hanyalah pelengkap dan pemanis berita saja, tidak terlalu penting dalam pembahasan ini.

Unsur **skrip** yang ada pada berita ini yaitu menguatkan akan frame Harian Jogja tentang perampasan tahta Kraton, bisa dilihat dari unsur *who* menjelaskan GKR Pembayun lah yang akan menjadi Calon ratu atau penerus tahta, dan unsur *what* menjelaskan sekilas isi tentang Dawuh Raja dan unsur *why* menjelaskan kenapa Pembayun bisa menjadi GKR Mangkubumi yang di artikan sebagai Penerus tahta Kraton Ngayogyakarta, unsur *where* menjelaskan tempat terjadinya Dhuh Raja adalah di Siti Hinggil secara tertutup, unsur *when* menjelaskan terjadinya pada tanggal 5 Mei 2015, tetapi unsur *how* disini menceritakan bagaimana reaksi para adik-adik sultan yang tidak menghadiri prosesi Dhawuh Raja.

Dalam unsur **tematik** secara umum berita diatas memiliki tema perampas tahta Kraton Ngayogyakarta, hal ini bisa di tandai dengan penggunaan *headline* berita yang sangat jelas menuduh GKR Pembayun lah Calon Ratu Yogyakarta berikutnya. Cara lainn melihat tema dalam berita ini adalah koherensi yang dipakai dalam menyambung antara kalimat atau proposisi, dari berita tersebut ada beberapa koherensi yang dipakai dia antaranya :

- a. Sebelumnya sejumlah kerabat Kraton, sentana dalem, **dan** abdi dalem datang terlebih dahulu ke Siti Hinggil.
- b. Persiapan Pembayun menjadi Putri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta **ini** dikukuhkan melalui proses Dhawuh Raja yang di gelar secara tertutup di Siti Hinggil.

Poin pertama menggunakan koherensi aditif (penambahan) ditandai dengan kata 'dan', kalimat tersebut menjelaskan siapa saja yang menghadiri prosesi Dhawuh Raja yang diselenggarakan di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta. Poin kedua menggunakan koherensi penjelas dengan ditandai kata 'ini' alimat ini menjelaskan bahwa Dhawuh Raja sebenarnya proses pengangkatan GKR Pembayun menjadi putri mahkota yang akan meneruskan tahta Kraton Yogyakarta dan bisa jadi menjadi Gubernur DIY menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X

Unsur **retoris** yang dipakai dalam berita ini adalah leksikon, beberapa kata dipakai untuk menekankan makna tertentu seperti kata "dikukuhkan" bisa dilihat pada paragraf pertama seperti berikut :

Persiapan Pembayun menjadi Putri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta ini dikukuhkan melalui proses Dhawuh Raja yang digelar secara tertutup di Siti Hinggil, Kompleks Kraton, Selasa (5/5). (terbit 6 Mei 2015)

Dalam kamus bahasa Indonesia kata dikukuhkan bisa berarti kuat terpancang pd tempatnya; tidak mudah roboh atau rusak (KBBI 1999:537) pemilihan kata dikukuhkan dipakai untuk menunjukkan bahwa pengangkatan Pembayun sebagai putri mahkota tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain, terlihat sedikit kurang bersinambung dengan frame Harian Jogja yang memiliki *frame* bahwa Pembayun lah perampas tahta Kraton Yogyakarta.

Selain menggunakan leksikon pada berita kali ini Harian Jogja juga menggunakan gambar, visualisasi sebagai unsur retorisnya. Bisa dilihat pada gambar berikut :



Dari gambar tersebut Harian Jogja ingin menyampaikan, perempuan itu ya kodrat nya dengan sapu, kemocing, dan bahan-bahan dapur lain nya, bukan memimpin sebuah kerajaan seperti keinginan Sri Sultan Hamnegku Buwono X dengan mengganti gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang menyebabkan presepsi orang bahwa Pembayun yang akan menjadi penerus tahta Kraton Yogyakarta.

Tabel 3.10

Frame Harian Jogja Seputar Perampas Tahta Kraton Yogyakarta

Elemen	Strategi Penulisan
Sintaksis	Dari semua narasumber yang di wawancarai di atas tidak ada yang mendukung Dhawuh raja ataupun penggantian nama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi. Beberapa sumber kembali menegaskan ketidak setujuan Harian Jogja mengenai Sabda raja dengan menggunakan seorang Sejarawan. Pendapat dari narasumber yang dipakai disusun untuk memperkuat <i>frame</i> Harian Jogja tentang permapasan tahta KRaton

Skrip	Menekankan pada aspek <i>who</i> dan <i>what</i> yang menjelaskan tentang <i>why</i> kenapa Pembayun menjadi putri mahkota. Sementara aspek <i>where</i> dan <i>when</i> juga di jelaskan pada berita ini, tetapi unsur <i>how</i> kurang diperhatikan dalam berita ini
Tematik	(1) Persiapan Pembayun menjadi Putri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta ini dikukuhkan melalui proses Dhawuh Raja yang di gelar secara tertutup di Siti Hinggil, (2) Sebelumnya sejumlah kerabat Kraton, sentana dalem, dan abdi dalem datang terlebih dahulu ke Siti Hinggil
Retoris	Penggunaan leksikon dalam penekanan kata ‘dikukuhkan’ sebagai bukti perampasan tahta kraton dan menggunakan unsur gambar atau foto untk memperkuat <i>frame</i> Harian Jogja

3. Wacana Lain Kedua Surak Kabar Harian

Pada sub bab ini peneliti menumukan beberapa berita seputar konflik internal Kraton yang di beritakan oleh SKH Kedaulatan Rakyatd dan Harian Jogja bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Pemberitaan Mengenai Konflik Internal Kraton

Koran	No	Hari/Tanggal Terbit	Judul Berita
Kedaulatan Rakyat	1	Sabtu 2 Mei 2015	‘Hapus’ Gelar Khalifatullah Sabdaraja Timbulkan Pro-Kontra
	2	Kamis 7 Mei 2015	Sultan Tampung Semua Masukan
	3	Jumat 8 Mei 2015	Sultan bantah Isi Sabda Raja
	4	Minggu 10 Mei 2015	Selamatkan KeratonJogja

	5	Senin 11 Mei 2015	Soal Internal Kraton Bisa Berdampak ke UUK
Harian Jogja	1	Senin 4 Mei 2015	DPRD minta penjelasan Sultan
	2	Selasa 5 Mei 2015	Kerabat Sultan Akui Situasi Kraton Pelik
	3	Kamis 7 Mei 2015	Konflik Kraton Meruncing
	4	Jumat 8 Mei 2015	Rayi dalem Galang Dukungan
	5	Jumat 15 Mei 2015	Kasultanan Menunggu Solusi

Berikut analisis Sintaksis peneliti mengenai pemberitaan konflik internal pada SKH Kedaulatan Rakyat, bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.12

Analisis Sintaksis dalam SKH Kedaulatan Rakyat

STRUKTUR SINTAKSIS		
No	Terbit	<i>Headline</i> (judul)
1	Sabtu 2 Mei 2015	'Hapus' Gelar Khalifatullah Sabdaraja Timbulkan Pro-Kontra
2	Kamis 7 Mei 2015	Sultan Tampung Semua Masukan
3	Jumat 8 Mei 2015	Sultan bantah Isi Sabda Raja
4	Minggu 10 Mei 2015	Selamatkan Keraton Jogja
5	Senin 11 Mei 2015	Soal Internal Kraton Bisa Berdampak ke UUK
<i>Lead</i>		
1	Sabtu 2 Mei 2015	Keputusan Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamnegku Buwono X untuk mengeluarkan Sabdaraja di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, Kamis (30/4) pukul 10.00 WIB sempat mengejutkan sejumlah kalangan. Selain undangan nya disampaikan secara mendadak, pisowanan yang dikhususkan bagi kalangan internal

		Kraton itu tertutup bagi media
2	Kamis 7 Mei 2015	Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamnegku Buwono X menegaskan dirinya memang telah memberi gelar baru kepada putri sulung nya Gsuti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dalam dawuh dalem yang dikeluarkannya Selasa (5/5). Sultan yang bersikukuh enggan menanggapi semua pertanyaan terkait pro-kontra Sabdaraja maupun Dhawuh dalem tersebut justru ingin menampung semua masukan, keluhan dan lain lain hingga pekan depan.
3	Jumat 8 Mei 2015	Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamnegku Buwono X memeberikan pernyataan yang mengejutkan terkait isi atau poin Sabdaraja yang beredar. Menurut Sultan, lima poin Sabdaraja yang beredar di media massa salah semuanya. Sultan juga menyayangkan sikap adik-adik nya terkait isi Sabdaraja sehingga menyebabkan polemik semakin meluas. "Lima poin (Sabdaraja) yang dimuat media massa tentang 5 hal tersebut salah semuanya. Saya juga menyayangkan sikap adik adik yang membuat polemik semakin meluas," kata Sri Sultan Hamnegku Buwono X usai penanaman pohon nyamplung di RPH Gubukrubuh, Getas, Playen Kamis (6/5).
4	Minggu 10 Mei 2015	Sebelas Rayi Dalem (adik) Sri Sultan Hamengku Buwono X telah sepakat berjuang menyadarkannya, demi menyelamatkan Kraton Yogyakarta. menurut mereka, apabila Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi atau GKR Pembayun dipaksakan sebagai putri mahkota selanjut nya akan menempati tahta Kraton Yogyakarta, sangat berbahaya karena mahzab nya tidak ada dalam kekhalifahan Mataram Islam.
5	Senin 11 Mei 2015	Meski Sabdaraja dan Dhawuhraja yang dikeluarkan oleh Raja Kraton Sri Sultan Hamnegku Buwono X, sifat nya lebih di peruntukkan bagi kalangan internal. Namun demikian memiliki dampak hingga keluar Kraton, yakni masyarakat luas tidak bisa di hindari. Antisipasi perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan
Latar Informasi		
1	Sabtu 2 Mei 2015	Berdasarkan data yang dihimpun KR dari berbagai sumber, Sabdaraja itu berisi lima hal. penyebutan Buwono diganti Bawono. Kedua gelar Khalifatullah yang dimiliki Sultan dihilangkan. Ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. Keempat mengubah perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek

		<p>dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.</p> <p>Adik Sultan GBPH Yudhaningrat membenarkan Sabdaraja berisi lima poin tersebut</p>
2	Kamis 7 Mei 2015	<p>“kalau sudah tahu jangan ditanyakan lagi, sekarang saya tidak mau banyak komentar. Kalo yang tiadak setuju biarkan berkoar-koar (bicara) dulu. Saya juga ingin melihat porsi redaksi media kira-kira mau apa, minggu depan baru saya akan ketemu wartawan buat konfrensi pers,” ujar Sultan HB X dikompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (6/5)</p>
3	Jumat 8 Mei 2015	<p>Sultan mengungkapkan, komentar adik-adik mengenai Sabdaraja sangat disayangkan. Padahal adik-adik tersebut tidak mengikuti pengucapan Sabdaraja yang sudah dilakukan 2 kali. Sehingga tidak mengetahui isi Sabdaraja dengan benar</p> <p>Sultan juga sudah memprediksi akan terjadi pro-kontra terkait dengan Sabdaraja. Bila ada masyarakat yang akan meminta penjelasan, persilahkan.</p>
4	Minggu 10 Mei 2015	<p>Kami bersebelas, Rayi Dalem Sultan HB X sudah menyiapkan jawaban-jawaban kepada beliau, dengan juru bicara KGPH Hadiwinito. Intinya, apa yang di ucapakan oleh Sultan HB X dalam Sabdaraja itu cacat hukum dan batal hukum karena tidak sesuai dengan paugeran pokok yang sudah ada.</p>
5	Senin 11 Mei 2015	<p>“Pasca Sultan memberikan penjelsan di Ndalamen Wironegaran, kami langsung mengadakan pertemuan. Adapun hasil dari pertemuan itu adalah memunta Gubernur DIY untuk mengantisipasi, terhadap kemungkinan yang timbul pasca dikeluarkannya sabdaraja dana dhawuhraja”, kata Ketua Dewan budaya DIY, Djoko Dwiyanto kepada KR, minggu (10/5).</p>
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Sabtu 2 Mei 2015	<p>GBPH Yudhaningrat(adik Sultan)</p> <p>Saya tidak menghadiri pisowanan tersebut karena harus mengajar di Diklat, tapi memang benar itu poin-poinnya</p> <p>Sultan Hamengku Buwono X</p> <p>Kowe kok ngerti, saya gag mau komentar dulu.</p> <p>GBPH Prabukusumo</p> <p>Saya memutuskan tidak hadir karena acaranya tidak jelas apa, dari pada kejadian seperti sabdatama. Saya di tuduh setuju dengan sabdatama tersebut dan kelihatan</p>

		<p>sangat pro di berbagai tangan televisi. Saya juga dituduh tahu isinya sebelum dibacakan, artinya saya tidak bermoral donk</p> <p>KGPH Hadiwinoto (Adik Sultan)</p> <p>Saya belum tahu maksudnya karena perlu baca lagi, maklum saya sudah berumur jadi saya harus membacanya lagi. . nanti biar keterangan resmi dari Kraton tentang hal in</p>
2	Kamis 7 Mei 2015	<p>Gubernur DIY (Sultan Hamnegku Buwono X)</p> <p>Adik-adik sudah saya undang, kalau tidak datang itu urusan mereka. Saya undang supaya bisa saya jelakan maksud nya apa, kalau tidak datang ya tidak apa apa. Termasuk ketidak setujuan mereka bisa saja, namanya orang diperbolehkan berbeda pendapat</p> <p>Djoko Dwiyanto (Ketua Dewan Kebudayaan DIY)</p> <p>Sabdaraja merupakan hak prerogatif Sultan sebagai seorang Raja</p> <p>Dirinya berharap agar gelar Khalifatullah tidak di hilangkan, karena Khalifatullahitu selalu melekat dalam diri seseorang, termasuk pemimpin yang di dalam nya termasuk Sultan sebagai Raja di Kraton Yogyakarta. apabila Khalifatullah itu dihilangkan akan menimbulkan dampak bagi masyarakat</p>
3	Jumat 8 Mei 2015	<p>Sultan Hamengku Buwono X</p> <p>Lima poin (Sabdaraja) yang dimuat media massa tentang 5 haltersebut salah semuanya. Saya juga menyayangkan sikap adik adik yang membuat polemik semakin meluas</p> <p>Sudah sejak zaman duhulu, saya yang melakukan ziarah ke makam, termasuk berbicara tentang spiritual.</p> <p>GBPH Yudhaningrat</p> <p>Isinya memang seperti yang di muat media antar lain menghilangkan gelar Khalifatullah, mengganti sebutan Buwono menjadi Bawono,</p>
4	Minggu 10 Mei 2015	<p>GBPH Yudhaningrat (Adik Sultan)</p> <p>Kami bersebelas, Rayi Dalem Sultan HB X sudah menyiapkan jawaban-jawaban kepada beliau, dengan juru bicara KGPH Hadiwinito</p> <p>Intinya, apa yang di ucapkan oleh Sultan HB X dalam Sabdaraja itu cacat hukum dan batal hukum karena</p>

		<p>tidak sesuai dengan paugeran pokok yang sudah ada.</p> <p>Seperti kereta api keluar dari rel</p> <p>Gubernur kita itu Hamengku Buwono, bukan Bawono</p> <p>GBPH Prabokusuma (Adik Sultan)</p> <p>Jawaban beliau itu yang tidak bisa di terima nalar</p> <p>“semoga masyarakat dapat memahami”</p> <p>Kami beserta kakak-kakak dan adik-adik ini ingin <i>njejegake jejege paugeran, dudu njejegake jejege kekarepansing bakal kenan benendhu</i>. Ingat, tahta raja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan</p>
5	Senin 11 Mei 2015	<p>Djoko Dwiyanto (Ketua Dewan Kebudayaan DIY)</p> <p>“Pasca Sultan memberikan penjelasan di nDalem Wironegaran, kami langsung mengadakan pertemuan. Adapun hasil dari pertemuan adalah meminta Gubernur DIY untuk mengantisipasi, terhadap kemungkinan yang timbul pasca di keluarkannya Sabda Raja dan Dhawuh Raja”</p> <p>Antisipasi itu perlu di lakukan, supaya sikap pro dan kontra yang muncul pasca dikeluarkannya, Sabda Raja dan Dhawuh Raja tidak di manfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab</p> <p>“Prinsipnya saya bisa memahami adanya reaksi pro dan kontra di masyarakat. Kendati demikian saya berharap polemik ini bisa segera diselesaikan. Karena bagaimanapun juga keistimewaan DIY harus tetap di jaga</p> <p>“Saya berharap semua pihak dapat bersikap bijaksana dan berpikir positif. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu polemik bisa segera diselesaikan</p> <p>Romo Tirun (Humas Kraton Yogyakarta)</p> <p>Semua harus di tindak lanjuti apabila ada pergantian nama harus di beritahukan, di umumkan ke semua instansi di tingkat daerah maupun pusat dan masyarakat.</p> <p>semua masih memakai nama Hamengku Buwono X sampai saat ini, belum di ubah sama sekali. Seharusnya masih memakai Buwono sekarang, karena beliau belum mengumumkan secara resmi di hadapan publik maupun memberikan surat perubahan anam yang sah masih Buwono bekum Bawono</p>
Penutup		

1	Sabtu 2 Mei 2015	Lain hal nya dengan adik kandung Sultan HB X, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto yang ikut hadir dan menyaksikan Sabdaraja tersebut mangku belum mengetahui maksudnya dengan persis “Saya belum tahu maksudnya karena perlu baca lagi, maklum saya sudah berumur jadi saya harus membacanya lagi. nanti biar keterangan resmi dari Kraton tentang hal ini,” tandanya
2	Kamis 7 Mei 2015	Dirinya berharap agar gelar Khalifatullah tidak di hilangkan, karena Khalifatullahitu selalu melekat dalam diri seseorang, termasuk pemimpin yang di dalam nya termasuk Sultan sebagai Raja di Kraton Yogyakarta. apabila Khalifatullah itu dihilangkan akan menimbulkan dampak bagi masyarakat
3	Jumat 8 Mei 2015	Gusti Yudha mengakui dirinya tidak hadir saat Sabdaraja pertama dibacakan Sultan pada kamis (30/4) pekan alalu. Namun ia mendapatkan keterangan tentang isi Sabdaraja dari <i>Rayi Dalem</i> KGPH Hadiwinoto yang menghaditi acara tersebut. “Isinya memang seperti yang di muat media antar lain menghilangkan gelar Khalifatullah, mengganti sebutan Buwono menjadi Bawono,” katanya. Dengan pernyataan Sultan media salah mengutip isi Sabdaraja, Gusti Yudha menilai Sultan justru berupaya melempar kesalahan ke pihak lain
4	Minggu 10 Mei 2015	Gusti Prabu juga menegaskan, sabdaraja tersebut merupakan paugeran agung namun sudah manyalahi paugeran pokok. Untuk dirinya bersama rayi-rayi dalem lain nya merasa sangat malu dengan hal tersebut, karena Sultan dinilai sudah tidak menghargai paugeran itu sendiri. “semoga masyarakatdapat memahami”. Kami beserta kakak-kakak daan adik-adik ini ingin <i>njejegake jejege paugeran, dudu njejegake jejege kekeparepansing bakal kenan benendhu</i> . Ingat, tahta raja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan ,” tandas GBPH Prabukusuma yang juga Ketua KONI DIY.
5	Senin 11 Mei 2015	“semua masih memakai nama Hamengku Buwono X sampai saat ini, belum di ubah sama sekali. Seharusnya masih memakia Buwono sekarang, karena beliau belum mengumumkan secara resmi di hadapan publik maupun memberikan surat perubahan anam yang sah masih Buwono bekum Bawono,” tandas nya

dapat dilihat dari analisis **sintaksis** di atas wacana lain yang dikembangkan oleh Kedaulatan Rakyat adalah pembelaan Sabda Raja melalui

berbagai konflik yang terjadi di dalam maupun luar Kraton. Sikap tersebut terlihat pada ke dua *headline* yang menyatakan pembelaan terhadap Sultan yaitu “Sultan Tampung Semua Masukan”, “Sultan bantah Isi Sabda Raja”, kedua headline tersebut lebih memberikan citra positif kepada sultan dan akan memberikan dukungan kepada Sultan tentunya. Pada ketiga *headline* lain nya Kedaulatan rakyat lebih menggambarkan konflik yang terjadi akibat Sabda raja, bisa di lihat sebagai berikut “ ‘Hapus’ Gelar Khalifatullah Sabdaraja Timbulkan Pro-Kontra “, “Selamatkan Keraton Jogja, dan “Soal Internal Kraton Bisa Berdampak ke UUK”. Dari kelima *headline* tersebut sedikit menunjukkan konsistensi Kedaulatan Rakyat yang mendukung realisasi Sabda Raja walaupun tidak semua *headline* menunjukkan dukungan terhadap Sabda Raja.

Perangkat **sintaksis** selanjut nya adalah *lead*, *lead* merupakan latar awal dari sebuah berita yang bisa memberi petunjuk sudut pandang dari berita tersebut dan dapat memberikan prespektif dan keseluruhan isi berita, dari kelima berita diatas *lead* yang di pilih adalah :

Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamnegku Buwono X menegaskan dirinya memang telah memberi gelar baru kepada putri sulung nya Gsuti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dalam dawuh dalem yang dikeluarkannya selasa (5/5). Sultan yang bersikukuh enggan menanggapi semua pertanyaan terkait pro-kontra Sabdaraja maupun Dhawuh dalem tersebut justru ingin menampung semua masukan, keluhan dan lain lain hingga pekan depan (Kamis 7 mei 2015).

Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamnegku Buwono X memeberikan pernyataan yang mengejutkan terkait isi atau poin Sabdaraja yang beredar. Menurut Sultan, lima poin Sabdaraja yang beredar di media massa salah semuanya. Sultan juga menyayangkan sikap adik-adik nya terkait isi Sabdaraja sehingga menyebabkan polemik semakin meluas. “Lima poin (Sabdaraja) yang dimuat media massa tentang 5 hal tersebut salah semuanya. Saya juga menyayangkan sikap adik adik yang membuat

polemik semakin meluas,” kata Sri Sultan Hamnegku Buwono X usai penanaman pohon nyamplung di RPH Gubukrubuh, Getas, Playen Kamis (6/5) (Jumat 8 Mei 2015).

Dari kedua *lead* di atas di pilih karena lebih menunjukkan akan dukungannya terhadap Sultan dan Sabda rajanya. Dalam *lead* pertama Kedaulatan rakyat menunjukkan dukungannya melalui sifat kearifan sultan yang di tunjukan dalam *lead* tersebut bisa di lihat sebagai berikut “Sultan yang bersikukuh enggan menanggapi semua pertanyaan terkait pro-kontra Sabdaraja maupun Dhawuh dalem tersebut justru ingin menampung semua masukan, keluhan dan lain lain hingga pekan depan”, disini Kedaulatan Rakyat sangat jelas menggambarkan kearifan Sultan dengan bersedianya beliau menampung semua masukan mengenai Sabda Raja dan Dhawuh Raja meskipun tidak di jelaskan untuk kalangan mana.

Pada *lead* kedua Kedaulatan Rakyat menggambarkan kekecewaan Sultan terhadap sikap para adik-adiknya yang membuat polemik semakin luas, dengan kata lain pada saat ini Sultan berada pada posisi orang yang di kecewakan karena ulah adik-adiknya yang membuat polemik Sabda Raja ini semakin luas dan menyabar kemana-mana, dimana seharusnya adik-adik Sultan tidak membuat polemik ini meluas, melainkan mendiskusikannya dengan Sultan bukan membuat pernyataan pernyataan di berbagai surat kabar, bisa di lihat pada kutipan berikut “Saya juga menyayangkan sikap adik adik yang membuat polemik semakin meluas”.

Perangkat Sintaktis selanjutnya adalah **latar informasi**, dari latar informasi berita diatas mencoba memberikan informasi tambahan yang dapat

memperkuat *frame*. Latar yang dipakai pada berita Kamis 7 Mei 2015 menjelaskan bagaimana Sultan menanggapi waratwan dan memperkuat lead Kedaulatan Rakyat dengan mencantumkan pernyataan dari Sultan sebagai berikut “Kalo yang tiadak setuju biarkan berkoar-koar (bicara) dulu. Saya juga ingin melihat porsi redaksi media kira-kira mau apa, minggu depan baru saya akan ketemu wartawan buat konferensi pers”, yang dimaksud tidak setuju disini lebih kepada para adik-adik Sultan sendiri yang berkoar koar di media tentunya. Sultan sendiri akan mengadakan konferensi pers tersendiri untuk mensosialisasikan Sabda Raja kepada masyarakat dan kalangan luar Kraton, tentu dengan penggambaran seperti ini akan memberikan porsi dukungan yang besar kepada Sultan

Pada latar informasi kedua Kedaulatan Rakyat lebih memilih menyalahkan sikap para adik-adik Sultan yang tidak menghadiri prosesi Sabda Raja tetapi ikut berkoar koar di media, dengan kata lain para adik adik Sultan tidak benar benar memahami isi dari Sabda Raja karena tidak menghadiri prosesinya, tetapi mereka (para adik Sultan) berani memberikan komentar kepada media. Di sisilain Kedaulatan Rakyat masih memberi dukungan kepada Sultan dengan menggambarkan sikap Sultan yang bijaksana dan arif mempersilahkan masyarakat untuk meminta penjelasan mengenai Sabda Raja, Sultan pun sudah memprediksi bahwa Sabda Raja akan menimbulkan pro-kontra, bisa di lihat pada latar informasi berikut :

Sultan mengungkapkan, komentar adik-adik mengenai Sabdaraja sangat disayangkan. Padahal adik-adik tersebut tidak mengikuti pengucapan

Sabdaraja yang sudah dilakukan 2 kali. Sehingga tidak mengetahui isi Sabdaraja dengan benar

Sultan juga sudah memprediksi akan terjadi pro-kontra terkait dengan Sabdaraja. Bila ada masyarakat yang akan meminta penjelasan, persilahkan.

Penggunaan **sumber berita, kutipan dan pernyataan** dari kelima berita di atas ada beberapa yang secara langsung dan tegas mengutarakan dukungannya terhadap Sultan Hamengku Buwono X, bisa dilihat sebagai berikut :

Sabdaraja merupakan hak prerogratif Sultan sebagai seorang Raja

Dari sumber berita yang di gunakan di atas, Kedaulatan Rakyat sangat jelas masih memberikan dukungan terhadap Sultan Hamengku buwono dengan menyantumkan bahwa seorang Raja berhak dalam bertutur dan memberikan perintah kepada rakyatnya dan hak itu sendiri bersifat prerogratif. Di lain sisi Kedaulatan Rakyat juga menggunakan beberapa sumber yang menggambarkan pihak akan ketidaksetujuannya terhadap Sabda Raja, bisa dilihat sebagai berikut :

Saya memutuskan tidak hadir karena acaranya tidak jelas apa, dari pada kejadian seperti sabdatama. Saya di tuduh setuju dengan sabdatama tersebut dan kelihatan sangat pro di berbagai tangan televisi. Saya juga dituduh tahu isinya sebelum dibacakan, artinya saya tidak bermoral donk

Intinya, apa yang di ucapkan oleh Sultan HB X dalam Sabdaraja itu cacat hukum dan batal hukum karena tidak sesuai dengan paugeran pokok yang sudah ada.

Kami beserta kakak-kakak dan adik-adik ini ingin *njejegake jejege paugeran, dudu njejegake jejege kekarepansing bakal kenan benendhu*. Ingat, tahta raja untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan

Dengan mencantumkan berbagai sumber dan pihak yang tidak menyetujui akan Sabda Raja Kedaulatan Rakyat ingin menggambarkan sedikit situasi pro-kontra yang di sebabkan oleh Sabda Raja, dikarenakan Sultan sendiri mengakui

bahwa Sabda Raja akan menimbulkan pro-kontra. Kedaulatan Rakyat sendiri ingin menggambarkan apa yang Sultan katakan Sebelumnya, dan seperti inilah salah satu contoh dukungan Kedaulatan Rakyat untuk mendukung Sultan.

Pada **penutup** kelima berita di atas memakai sumber yang berbeda-beda, pada berita pertama tentang ‘Hapus’ Gelar Khalifatullah Sabdaraja Timbulkan Pro-Kontra, Kedaulatan Rakyat menutup berita dengan menggunakan pendapat dari GBPH Hadiwinoto yang ikut menghadiri prosesi Sabda Raja dan enggan berkomentar mengenai makna sesungguhnya dengan alasan dirinya sudah berumur, sementara pada penutup berita kedua menggunakan pendapat dari Djoko Dwiyanto (Ketua Dewan Kebudayaan DIY) yang berpendapat agar gelar Khalifatullah tidak dihilangkan, pada penutup berita ketiga, dan keempat lebih menunjukkan berbagai kalangan yang tidak menyetujui Sabda Raja baik itu dari adik-adik Sultan dan Budayawan, pada penutup kelima Kedaulatan Rakyat menggunakan pernyataan bahwa Sabda Raja belum resmi atau masih proses realisasi, ini dibuktikan dengan administrasi Kraton masih menggunakan nama Buwono bukan Bawono.

Dari unsur **skrip** atau bagaimana wartawan mengisahkan berita, Kedaulatan Rakyat masih tetap pada frame mereka yaitu mendukung Sultan Hamengku Buwono dengan Sabda Rajanya, walaupun begitu Kedaulatan Rakyat masih sedikit menampilkan pro-kontra dan para pihak yang menolak Sabda Raja. Seperti dalam berita “Sultan Tampung Semua Masukan” yang menggambarkan kearifan Sultan dalam bermasyarakat kepada rakyatnya sendiri, dimana pada Harian Jogja tidak sama sekali menampilkan berita tersebut. Selain membela

Sultan Kedaulatan Rakyat juga memberikan pandangan kurang baik kepada para adik-adik Sultan yang menolak Sabda Raja, bisa dilihat pada latar informasi di bawah :

Sultan mengungkapkan, komentar adik-adik mengenai Sabdaraja sangat disayangkan. Padahal adik-adik tersebut tidak mengikuti pengucapan Sabdaraja yang sudah dilakukan 2 kali. Sehingga tidak mengetahui isi Sabdaraja dengan benar

Dalam unsur **tematik**, kelima berita di atas memiliki tema pembelaan Sabda Raja melalui berbagai konflik yang terjadi di dalam maupun luar Kraton, Kedaulatan Rakyat menyajikannya dengan pembelaan dan beberapa konflik atau pernyataan tidak kesetujuan dari beberapa pihak. Dari koherensi yang dipakai juga memperkuat tema yang diangkat dari kelima berita tersebut, beberapa koherensi yang dipakai bisa dilihat seperti yang ada di bawah ini :

1. Saya tidak menghadiri pisowanan tersebut **karena** harus mengajar di Diklat
2. Saya memutuskan tidak hadir **karena** acaranya tidak jelas apa, dari pada kejadian seperti sabdatama. Saya di tuduh setuju dengan sabdatama tersebut **dan** kelihatan sangat pro di berbagai tangan televisi. Saya juga dituduh tahu isinya sebelum dibacakan, artinya saya tidak bermoral donk
3. Lima poin (Sabdaraja) yang dimuat media massa tentang 5 hal tersebut salah semuanya. Saya juga menyayangkan sikap adik-adik **yang** membuat polemik semakin meluas
4. Dirinya berharap agar gelar Khalifatullah tidak di hilangkan, **karena** Khalifatullah itu selalu melekat dalam diri seseorang, termasuk pemimpin yang di dalam nya termasuk Sultan sebagai Raja di Kraton Yogyakarta
5. semua masih memakai nama Hamengku Buwono X sampai saat ini, belum di ubah sama sekali. Seharusnya masih memakai Buwono sekarang, **karena** beliau belum mengumumkan secara resmi di hadapan publik maupun memberikan surat perubahan nama yang sah masih Buwono belum Bawono

poin pertama menggunakan koherensi sebab-akibat di tanda dengan “karena”, kalimat tersebut menjelaskan bahwa ketidakhadiran GBPH Yudhaningrat dikarenakan urusan mengajar diklat, bisa dilihat bahwa GBPH Yudhaningrat adalah salah satu adik Sultan yang juga banyak berkomentar mengenai Sabda Raja kepada media, disini Kedaulatan Rakyat ingin menyampaikan bahwa sikap GBPH Yudhaningrat kurang baik. Poin kedua menggunakan koherensi sebab-akibat dan penjelas di tandai dengan kata “karena” dan “dan”, kalimat tersebut merujuk kepada sikap GBPH Prabokusumo yang menilai undangan acara tersebut tidak jelas, dan dia memutuskan untuk tidak hadir, dan koherensi penjelas sendiri menjelaskan bahwa GBPH Prabokusumo tidak mau dituduh lagi atas sikap pro nya di berbagai televisi dalam kasus Sabda Tama. Poin ketiga menggunakan koherensi penjelas di tandai dengan menggunakan kata “yang”, kalimat tersebut menjelaskan sikap para adik-adik sultan polemik Sabda Raja semakin meluas dengan sikap mereka yang ikut berkomentar di berbagai media dan secara terang terang mengungkapkan ketidaksetujuan nya terhadap Sabda Raja. Poin keempat menggunakan koherensi sebab-akibat di tandai dengan penggunaan kata “karena”, kalimat tersebut menjelaskan betapa melekat nya gelar Khalifatullah selama ini pada pemimpin Kraton Yogyakarta, jika gelar Khalifatullah dihilangkan tentunya akan mengurangi kewibawaan seorang pemimpin Kraton yang identik dengan Kerajaan Mataram Islam. Poin kelima menggunakan koherensi sebab-akibat di tandai dengan menggunakan kata “karena”, kalimat ini menjelaskan tentang belum resminya pergantian nama Sultan dari Buwono menjadi Bawono, ini terbukti bahwa nama

Sultan pada instansi instansi di jogja masih menggunakan nama Buwono, dan jika memang sudah resmi pergantian nama tersebut tentunya akan mengumumkannya secara resmi di hadapan publik.

Struktur selanjutnya adalah **retoris**, dalam struktur retoris analisis yang akan di tonjolkan lebih bagaimana wartawan menekankan sebuah fakta menggunakan kata, idiom, gambar/foto dan grafik, media massa juga menentukan apakah peristiwa hendak ditulis secara panjang atau pendek; apakah di tempatkan di halaman pertama atau tidak; apakah peristiwaditulis secara bersambung ataukah tidak. Semua pilihan tersebut adalah kemungkinan yang dapat di ambil oleh media (Eriyanto, 2002 : 27-28). Salah satu unsur retoris leksikon, beberapa kata dipakai untuk menekankan makna tertentu seperti kata “prerogratif” dan “berkoar-koar” bisa di lihat pada paragraf pertama seperti berikut :

Sabdaraja merupakan hak **prerogratif** Sultan sebagai seorang Raja

Kalo yang tiadak setuju biarkan **berkoar-koar** (bicara) dulu

Dalam kamus bahasa indonesia sendiri “prerogratif memiliki arti hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan (KBBI 1999:787). Kata prerogratif digunakan oleh Kedaulatan Rakyat untuk menjunjung tinggi derajat Sultan yang di setarakan oleh kepala negara. Dimana prerogratif sendiri lebih cenderung digunakan oleh seorang kepala negara bukan seorang Raja apalagi Gubernur. Pada berita kedua kata berkoar-koar ini di tunjukan lebih kepada para adik-adik Sultan yang menolak Sabda Raja dan lebih banyak berkomentar di media walaupun tidak semua adik-adik Sultan ikut dalam prosesi Sabda Raja yang dimana Sultan

Sendiri telah memberikan undangan kepada mereka. Berkoar-koar sebenarnya memiliki arti berkata dengan suara keras (dengan maksud menantang, menghina, dan sebagainya); berteriak: seorang pun tidak ada yang berani, berbunyi dengan nyaring. (KBBI 1999- 509)

Tabel 3.13

Frame Kedaulatan Rakyat Pembelaan Sabda Raja Melalui Berbagai Konflik yang Terjadi di Dalam maupun di Luar Kraton

Elemen	Strategi penulisan
Sintaksis	Penyusunan berita oleh Kedaulatan Rakyat memperlihatkan sifat kearifan dan keagungan Sultan di saat berbagai konflik dan pro-kontra datang yang di sebabkan oleh Sabda Raja. Dimana terlihat jelas pembelaan terhadap Sultan Hamengku Buwono
Skrip	Pembelaan terhadap Sultan Hamengku Buwono, bisa dilihat dengan cara wartawan menyusun berita, Kedaulatan Rakyat masih tetap pada frame mereka yaitu mendukung Sultan Hamengku Buwono dengan Sabda Raja nya, walaupun begitu Kedaulatan Rakyat masih sedikit menampilkan pro-kontra dan para pihak yang menolak Sabda Raja
Tematik	(1)Saya tidak menghadiri pisowanan tersebut karena harus mengajar di Diklat(2)Saya memutuskan tidak hadir karena acaranya tidak jelas apa, dari pada kejadian seperti sabdatama. Saya di tuduh setuju dengan sabdatama tersebut dan kelihatan sangat pro di berbagai tangan televisi. Saya juga dituduh tahu isinya sebelum dibacakan, artinya saya tidak bermoral donk(3)Lima poin (Sabdaraja) yang dimuat media massa tentang 5 hal tersebut salah semuanya. Saya juga menyayangkan sikap adik adik yang membuat polemik semakin meluas(4)Dirinya berharap agar gelar Khalifatullah tidak di hilangkan, karena Khalifatullahitu selalu melekat dalam diri seseorang, termasuk pemimpin yang di dalam nya termasuk Sultan sebagai Raja di Kraton Yogyakarta(5)semua masih memakai nama Hamengku Buwono X sampai saat ini, belum di ubah sama sekali. Seharusnya masih memakai Buwono sekarang, karena beliau belum mengumumkan secara resmi di hadapan publik maupun memberikan surat

	perubahan nama yang sah masih Buwono belum Bawono
Retoris	Penggunaan leksikon dalam penekanan kata ‘prerogratif’ dan “berkoar-koar”, dimana prerogratif untuk meninggikan drajat Sultan, dan berkoar-koar untuk meberikan citra buruk kepada para adik-adik Sultan

Tabel 3.14

Analnsi Sintakasi SKH Harian Jogja

STRUKTUR SINTAKSIS		
No	Terbit	<i>Headline</i> (judul)
1	Senin 4 Mei 2015	DPRD minta penjelasan Sultan
2	Selasa 5 Mei 2015	Kerabat Sultan Akui Situasi Kraton Pelik
3	Kamis 7 Mei 2015	Konflik Kraton Meruncing
4	Jumat 8 Mei 2015	Rayi dalem Galang Dukungan
5	Jumat 15 Mei 2015	Kasultanan Menunggu Solusi
<i>Lead</i>		
1	Senin 4 Mei 2015	Dewan menilai perubahan gelar Sultan berimplikasi terhadap perubahan naskah undang-undang no.13/2012 tentang keistimewaan DIY (UUK)
2	Selasa 5 Mei 2015	Jogja-Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, adik Sri Sultan HB X mengungkapkan kerabat Sultan merasa terpukul dengan situasi terjadi di internal Kraton saat ini
3	Kamis 7 Mei 2015	Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat mengatakan sikap itu diambil sejumlah keluarga Kraton karena selama ini Ngarsa Dalem Ngayogyakarta menyandang gelar Khalifatullah dan Hamengku Buwono
4	Jumat 8 Mei 2015	Merekea berkumpul di Ndalem Yudhanegaran (kediaman GBPH Yudhaningrat) di Jl. Ibu Ruswo kamis (7/5). Kerabat Sultan dari HB IX yang hadir

		adalah GBPH Pakuningrat, GBPH Suryodinigratan, GBPH Hadinegoro, GBPH Suryonegoro, dan GBPH Suryo Mataram
5	Jumat 15 Mei 2015	Rayi dalem sudah memproses dua Sabda yang dikeluarkan HB X beberapa waktu lalu tersebut “ <i>Mangga</i> (silahkan) Ngarsa Dalaem menanggapi bagaimana”, kata salah satu adik HB X yang tinggal di Jakarta, Gusti Bendero Pangeran Haryo (GBPH) Suryodinigratan, saat dihubungi melalui ponsel kamis (14/5) sore.
Latar Informasi		
1	Senin 4 Mei 2015	Sultan mengeluarkan Sabdaraja, kamis pekan lalu, di Siti Hinggil, kompleks Kraton. Poin dalam Sabda raja tersebut di antaranya, mneghilangkan klausul Khalifatullah yang melekat dalam gelar Sultan, mengganti klausul Buwono menjadi Bawono, mengubah perjanjian pendiri Mataran Ki Ageng Pamanahan dengan Ki Ageng Giring, dan Sultan juga menyempurnakan Keris Kanjeng Kyai Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.
2	Selasa 5 Mei 2015	Kondisi Kraton agak pelik setelah Sultan HB X mengeluarkan Sabda raja, kamis (30/4) Poin dalam Sabda raja tersebut di antaranya, mneghilangkan klausul Khalifatullah yang melekat dalam gelar Sultan, mengganti klausul Buwono menjadi Bawono, mengubah perjanjian pendiri Mataran Ki Ageng Pamanahan dengan Ki Ageng Giring, dan Sultan juga menyempurnakan Keris Kanjeng Kyai Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun
3	Kamis 7 Mei 2015	Pada kamis (30/4), Sri Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja yang isinya menghapus dua kata tersebut dari gelar Raja Kraton Ngayogyakarta kata Buwono di ganti Bawono sedangkan Khalfatullah hilang.
4	Jumat 8 Mei 2015	Mereka yang merupakan putra HB IX dari ibu GRAY Ciptomerti datang dari Jakarta akrena persoalan di internal Kraton. Mereka berhimpun dengan rayi dalem yang ada di Jogja
5	Jumat 15 Mei 2015	GBPH Suryodinigratan mengakui polemik yang terjadi di internal keluarga Kraton bisa berdampak pada abdi dalem, dan masyarakat Jogja pada umumnya. Para rayi dalem yang tinggal di Jakarta akan kembali merapat ke Jogja jika Sultan mengundangnya .”Kami menunggu , kalo di undang ke Jogja lagi ,” kata Suryodinigratan

Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Senin 4 Mei 2015	<p>Akbar Arif Noor Hartanto (Wakil Ketua I DPRD DIY)</p> <p>Menghilangkan kata Khilafah berarti mengubah nomenklatur yang ada dalam UU Keistimewaan</p> <p>Kalau Gubernur dan Pemda DIY tidak ada inisiatif bertemu DPRD, kami akan mengundang Gubernur dan Pemda untuk menjelaskan</p> <p>Heru Wahyu Kismoyo (Dosen Filsafat Mataram Universitas Widy Mataram)</p> <p>Jika nama Sultan di ganti dengan nama lain, aplaagi gelar nya tidak sama sebagaimana yang tercantum dalam UUK, tentunya Sultan, bukan lagi pemimpin Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan bukan lagi Gubernur DIY, atau tidak dapat diajukan sebagai calon Gubernur DIY</p> <p>“Perubahan satu kata implikasinya sanagt luas”</p> <p>“ketika diganti dengan Hamengku Bawono yang tidak sepadan dengan terminologi Ngayogyakarta, bagaimana ?</p> <p>“Sama dengan Presiden RI yang identik dengan negara kesatuan RI sebagai simbol Kenegaraan. Apa jadinya jika diganti negara persatuan RI yang identik dengan federasi”</p> <p>Sultan Hamengku Buwono X</p> <p>“ya terserah pusat saja,”</p>
2	Selasa 5 Mei 2015	<p>GBPH Prabokusumo (adik Sultan)</p> <p>“kami terpukul sekali, kemana-mana ditanya, bingung mau menjelaskan (Sabda Raja) bagaimana</p> <p>“tak punya pamrih”</p> <p>“karena bisa di gugat ke PTUn oleh keturunan HB I- HB IX</p> <p>Nikmatul Huda (Pakar Hukum UII)</p> <p>Sabda Raja tidak bisa di gugat ke PTUN, karena Sabda raja bukan bagian dari produk hukum, melainkan aturan internal Kraton</p> <p>Sabda raja tidak lepas dari keinginan Sultan untuk</p>

		meloloskan anak nya menjadi Gubernur DIY
3	Kamis 7 Mei 2015	<p>GBPH Yudhaningrat</p> <p>“karena sudah tidak mengakui (HB X), jangan harap kami datang ketika di undang”</p> <p>“kalau belia masih nekat, kami tidak bisa berbuat apa apakecuali menyerahkannya (masalah ini) kepada Tuhan saja”</p> <p>“lihat saja putri-putrinya yang mana yang tidak diberikan perusahaan? Tetapi soal pengangkatan menjadi ratu, itu kan lain soal”</p> <p>“kami persilahkan masyarakat untuk hadir mengutarakan unek-uneknya. Ini penting untuk referansi kami mengambil sikap”</p> <p>Sukiman (Ketua Semar Sembogo)</p> <p>ini “Kami ingin tahu bagaimana eksekusi keputusan Sultan terhadap Undang-undang keistimewaan”</p>
4	Jumat 8 Mei 2015	<p>GBPH Yudhaningrat (adik Sultan)</p> <p>“kami ingin supaya Kraton bisa <i>jejeg</i> (tegak) tak menabrak aturan pokok”</p> <p>GBPH Suryodinigratan (adik Sultan)</p> <p>“kami akan pertemuan terlebih dahulu dengan kangmaskangmas lain nya”</p> <p>Mas Wedana Nitikartiya</p> <p>“Saya sebagai abdi dalem merasa <i>ora ayem maneh</i>(tidak lagi tentram)</p>
5	Jumat 15 Mei 2015	<p>GBPH Suryodinigratan (adik Sultan)</p> <p>“<i>Mangga</i> (silahkan) Ngarsa Dalaem menanggapinya bagaimana”</p> <p>”Kami menunggu , kalo di undang ke Jogja lagi”</p> <p>GBPH Yudhaningrat (adik Sultan)</p> <p>“Musyawarah lebih enak dibanding <i>atos-atosan</i>(saling bersikeras)</p> <p>Muhammad Shodiq(Sosiolog UIN)</p> <p>Polemik Sabda Raja dan Dhawuh Raja sebenarnya persoalan internal Kraton, tetapi bisa berdampak pada</p>

		<p>masyarakat</p> <p>“Maka musyawarah keluarga perlu dikuatkan”</p> <p>GBPH Pakuningrat (adik Sultan)</p> <p>Tidak akan mengakui adanya putri mahkota taupun Sultan perempuan dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat</p>
Penutup		
1	Senin 4 Mei 2015	Sultan mengatakan secara resmi pemerintah harus mengetahui Sabda raja. Disinggung apakah arah dari Sabda raja itu Sultan ingin mengamandemen UUK ? Sultan menjawab tidak tahu “ya terserah pusat saja,” kata Raja yang memiliki nama kecil Bendara Raden Mas Herjuno Darpito ini
2	Selasa 5 Mei 2015	Sultan mengatakan secara resmi Pemerintah harus mengetahui Sabda Raja. Sultan juga menyerahkan implikasi Sabda Raja terhadap UUK kepada Pemerintah Pusat
3	Kamis 7 Mei 2015	Sementara itu Paguyuban Dukuh (Kepala Dusun) dan Perangkat Desa se-DIY, Semar Sembogo, khawatir keputusan Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja akan melunturkan Undang-undang keistimewaan DIY (UUK). Ketua Semar Sembogo, Sukiman, mengatakan Semar sembogo akan melakukan audiensi dengan DPRD DIY kamis ini “Kami ingin tahu bagaimana eksekusi keputusan Sultan terhadap Undang-undang keistimewaan” kata Sukiman
4	Jumat 8 Mei 2015	Tjahjo mengaku sebageian keluarga Kraton mendatangi dirinya untuk mendorong adanya rapat keluarga terkait adanya Sabda Raja tersebut. Meski begitu, dirinya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan rekomendasi, saran, maupun kebijakan sejenisnya.
5	Jumat 15 Mei 2015	Rabu siang, Sultan mengatakan draf Sabda Raja belum di kirimkan ke Kementrian Dalam Negeri(Kemendagri). Ia masih akan mengecek terlebih dahulu kata-kata Sabdanya.

Dari analisis **sintaksis** di atas wacana lain yang dikembangkan oleh Harian Jogja adalah penolakan terhadap Sabda Raja dengan menggunakan penggambaran berbagai konflik yang terjadi di kalangan internal Kraton maupun eksternal

Kraton. Sikap tersebut terlihat jelas pada kelima *headline* tersebut yaitu “DPRD minta penjelasan Sultan”, “Kerabat Sultan Akui Situasi Kraton Pelik”, “Konflik Kraton Meruncing”, “Rayi dalam Galang Dukungan”, dan “Kasultanan Menunggu Solusi”. Kelima *headline* tersebut menggambarkan berbagai situasi yang terjadi akibat dikeluarkannya Sabda Raja oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, wacana ini masih konsisten dengan sikap Harian Jogja yang menolak realisasi Sabda Raja.

Perangkat **sintaksis** selanjutnya adalah *lead*, *lead* merupakan latar awal dari sebuah berita yang bisa memberi petunjuk sudut pandang dari berita tersebut dan dapat memberikan perspektif dan keseluruhan isi berita, ketidaksetujuan Harian Jogja terhadap Sabda Raja terlihat jelas pada kedua *lead* berikut :

Dewan menilai perubahan gelar Sultan berimplikasi terhadap perubahan naskah undang-undang no.13/2012 tentang keistimewaan DIY (UUK) (Senin 4 Mei 2015)

Jogja-Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, adik Sri Sultan HB X mengungkapkan kerabat Sultan merasa terpukul dengan situasi terjadi di internal Kraton saat ini (Selasa 5 Mei 2015)

Dalam *lead* pertama Harian Jogja menggunakan pendapat dari Wakil Ketua DPRD. Dalam *lead* tersebut Harian Jogja kembali menggunakan sudut pandang dari *frame*nya bahwa Sabda Raja yang berisi pergantian gelar Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Buwono menjadi Bawono dapat mengakibatkan perubahan naskah UUK DIY dan memungkinkan akan terhadpanya keistimewaan DIY, dikarenakan perubahan gelar penguasa atau Raja Kraton Yogyakarta Hadiningrat.

Dalam *lead* kedua Harian Jogja menggunakan pendapat dari GPBH Prabukusumo yang pendapatnya beberap kali dipakai oleh Harian Jogja dalam menanggapi Sabda Raja. Pada *lead* kedua ini Harian Jogja menggunakan prespektif dari kalangan internal Kraton dan para Kerabat Sultan yang merasa terpuak atas situasi yang terjadi, situasi tersebut adalah konflik beberapa pihak mengenairealisasi Sabda Raja yang di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan konflik ini membuat buruk situasi Kraton yang tadinya tentram dan nyaman. Dengan prespektif ini seklai lagi Harian Jogja memguatkan *frame* nya tentang penolakan Sabda Raja.

Perangkat Sintaktis selanjut nya dalah **latar informasi**, dari latar informasi berita diatas mencoba memberikan informasi informasi tambahan yang dapat memepkuat *frame*. Latar yang dipakai pada berita pertama pada Senin 4 mei 2015 lebih menjelaskan pada prosesi terjadinya Sabda Raja, disni Harian Jogja menjelaskan prosesi Sabda Raja untuk menguatkan *lead* mereka tentang penolakan Sabda Raja, dan isi dari Sabda Raja itu sendiri bisa terjadi perubahan naskah pada UUK DIY, walaupun tidak terlihat secara jelas penolakan terhadap Sabda Raja pada latar informasi tersebut. Latar tersebut di tulis seperti di bawah ini :

Sultan mengeluarkan Sabdaraja, Kamis pekan lalu, di Siti Hinggil, kompleks Kraton. Poin dalam Sabda raja tersebut di antaranya, mneghilangkan klausul Khalifatullah yang melekat dalam gelar Sultan, mengganti klausul Buwono menjadi Bawono, mengubah perjanjian pendiri Mataran Ki Ageng Pamanahan dengan Ki Ageng Giring, dan Sultan juga menyempurnakan Keris Kanjeng Kyai Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Pada latar informasi kedua Harian Jogja mewnggambarkan situasi Kraton yang pelik setelah Sabda Raja di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada latar ini Harian Jogja masih menggunakan prespektif para adik-adik Sultan dalam menggambarkan kepilkan suasana Kraton setelah Sabda Raja, selain itu Harian Jogja kemabli menerangkan isi dari Sabda Raja tersebut agar para pembaca dana masyarakt benar benar mengerti kenapa penolakan akan Sabda Raja oleh Harian Jogja ini di utarakan.

Penggunaan **sumber berita**, kutipan dan pernyataan dari kelima berita di atas ada beberapa yang secara langsung dan tegas mengutarakan penolakan mengenai Sabda Raja, bisa dilihat sebagai berikut :

Jika nama Sultan di ganti dengan nama lain, aplaagi gelar nya tidak sama sebagaimana yang tercantum dalam UUK, tentunya Sultan, bukan lagi pemimpin Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dan bukan lagi Gubernur DIY, atau tidak dapat diajukan sebagai calon Gubernur DIY

Tidak akan mengakui adanya putri mahkota taupun Sultan perempuan dalam Kasultanan Ngayogyokarta Hadiningrat

“kami ingin supaya Kraton bisa *jejeg* (tegak) tak menabrak aturan pokok”

“karena sudah tidak mengakui (HB X), jangan harap kami datang ketika di undang”

“Saya sebagai abdi dalem merasa *ora ayem maneh*(tidak lagi tentram)”

Dari ketiga kutipan tersebut sangat terlihat jelas sumber berita akan menguatkan frame harian Jogja yang menolak akan realisasi Sabda Raja, tetapi disisi lain Harian Jogja juga menampilkan beberapa sumber berita yang mengungkapkan secara tidak langsung akan penolakan terhadap Sabda Raja, bisa dilihat sebagai berikut :

“Perubahan satu kata implikasinya sanagt luas”

“ketika diganti dengan Hamengku Bawono yang tidak sepadan dengan terminologi Ngayogyakarta, bagaimana ?”

“kalau belia masih nekat, kami tidak bisa berbuat apa apakecuali menyerahkannya (masalah ini) kepada Tuhan saja”

Dari ketiga sumber berita walaupun mereka tidak secara langsung menolak akan Sabda Raja tetapi isi dan pernyataan mereka masih bisa memperkuat *frame* dari Harian Jogja yang menolak akan realisasi Sabda Raja di Kraton Yogyakarta, dikarenakan isi dari pernyataan narasumber lebih ke berbagai dampak yang akan terjadi setelah Sabda Raja di bacakan, dan dampak yang dimaksudkan oleh Harian Jogja adalah berbagai dampak negatif dari Sabda Raja yang di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Pada **penutup** kelima berita di atas hanya satu penutup berita yang masih mengutarakan ketidaksetujuan atas Sabda Raja, bisa dilihat pada berita Kamis 7 Mei 2015 yang mengutarakan pendapat dari Kepala Dusun Semar Sembogo Sukirman mengenai kekhawatiran akan keputusan Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja akan melunturkan Undang-undang keistimewaan DIY (UUK). Dan ke empat penutup berita lainnya hanya sebagai pelengkap berita dan bukanlah sesuatu yang penting untuk ditonjolkan dan tidak digunakan untuk memperkuat *frame* dari Harian Jogja yang tidak menyetujui akan Sabda Raja. Di bagian ini, berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut.”Ketika para reporter meliput peristiwa, mereka

selalu berpikir tentang cerita apa yang harus mereka tulis,”(McGraw-Hill 1991:128).

Dari unsur **skrip** atau bagaimana wartawan mengisahkan berita, Harian Jogja lebih cenderung mengisahkan konflik yang terjadi di Kraton dan berbagai penolakan akan Sabda Raja dari prespektif para adik-adik Sultan, seperti dalam berita “Kerabat Sultan Akui Situasi Kraton Pelik” yang mengisahkan kondisi Kraton Yogyakarta yang tidak kondusif dan tentrem lagi setelah Sabda Raja di bacakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, seperti dalam paragraf berikut :

Jogja-Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, adik Sri Sultan HB X mengungkapkan kerabat Sultan merasa terpukul dengan situasi terjadi di internal Kraton saat ini

Dalam unsur **tematik**, keima berita di atas memiliki tema yang intinya sama yaitu menolak Sabda Raja, tetapi Harian Jogja lebih menggunakan cara pandang dari berbagai kalangan untuk menolak Sabda Raja ini, seperti cara pandang adik-adik Sultan dan Wakil DPRD Yogyakarta. dari koherensi yang di pakaijuga memperkuat tema yang di angkat dari kelima berita tersebut, beberapa koherensi yang dipakai bisa dilihat seperti yang ada di bawah ini :

1. lihat saja putri-putrinya yang mana yang tidak diberikan perusahaan? **Tetapi** soal pengangkatan menjadi ratu, itu kan lain soal
2. Polemik Sabda Raja **dan** Dhawuh Raja sebenarnya persoalan internal Kraton, tetapi bisa berdampak pada masyarakat
3. ketika diganti dengan Hamengku Bawono **yang** tidak sepadan dengan terminologi Ngayogyakarta, bagaimana
4. Sama dengan Presiden RI yang identik dengan negara kesatuan RI sebagai simbol Kenegaraan. Apa jadinya **jika** diganti negara persatuan RI yang identik dengan federasi

5. Sabda Raja tidak bisa di gugat ke PTUN, **karena** Sabda Raja bukan bagian dari produk hukum, melainkan aturan internal Kraton

Poin pertama menggunakan koherensi pembeda dengan di tandai kata “tapi”, kalimat tersebut menegaskan bahwa pemberian kekuasaan berbeda hal nya dengan hanya sebuah pemberian perusahaan yang di lakukan oleh Sri Sultan Hamngku Buwono X terhadap para putri-putri nya, terlebih lagi putri nya GKR Pembayun yang di berikan Tahta putri mahkota yang secara tidak langsung akan meneruskan tahta Kraton, disni Harian Jogja memberikan perbandingan bahwa pemberian Perusahaan dan tahtabukan lah sesuatu yang sebanding dan bisa di lakuka semudah itu oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Poin kedua menggunakan koherensi penjelas, ditandai dengan penggunaan kata “dan”, kalimat tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya Sabda Raja saja yang selama ini menimbulkan pro-kontra maupun konflik yang terjadi baik itu di kalangan internal Kraton ataupun eksternal Kraton, tetapi Dhawuh Raja juga membawa dampak yang sama dengan Sabda Raja. Poin ketiga menggunakan koherensi penjelas di tandai dengan menggunakan kata “yang”, kaliaamt tersebut menjelaskan perubahan nama Sultan dari Buwono menjadi Bawono, dimana nama baru Sultan yaitu Bawono tidak memiliki terminologi yang sepadan di Yogyakarta di bandingkan nama Buwono yang sudah melegenda dan di pakai oleh Sultan HB I sampai HB IX. Poin keempat menggunakan koherensi sebab-akibat dengan di tandai kata “jika”, kalimat tersebut menegaskan bahwa perubahan gelar Presiden RI pun juga memiliki dampak kepada Wilayah yang di kuasainyadan sistem pemerintahan nya pun juga akan berubah, maksud dari kutipan tersebut adalah membandingkan pergantian nama Sultan kepada Presiden RI. Poin kelima

menggunakan koherensi sebab-akibat dengan ditandai dengan kata “karena”, kalimat tersebut menjelaskan bahwa pelaporan Sabda Raja ke PUTN tidak akan berlaku, ini dikarenakan Sabda Raja bukanlah sebuah produk hukum negara, melainkan aturan Kraton sendiri, dan pelaporan mengenai Sabda Raja tidak bisa di tindak lanjuti oleh negara, melainkan harus di selesaikan oleh pihak Kraton sendiri.

Struktur selanjutnya adalah **retoris**, dalam struktur retoris analisis yang akan di tonjolan lebih bagaimana wartawan menekankan sebuah fakta menggunakan kata, idiom, gambar/foto dan grafik, media massa juga menentukan apakah peristiwa hendak ditulis secara panjang atau pendek; apakah di tempatkan di halaman pertama atau tidak; apakah peristiwaditulis secara bersambung ataukah tidak. Semua pilihan tersebut adalah kemungkinan yang dapat di ambil oleh media (Eriyanto, 2002 : 27-28). Salah satu unsur retoris leksikon, beberapa kata dipakai untuk menekankan makna tertentu seperti kata “Galang” dan “terpukul” bisa di lihat pada paragraf pertama seperti berikut :

Rayi dalem **Galang** Dukungan

Jogja-Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, adik Sri Sultan HB X mengungkapkan kerabat Sultan merasa **terpukul** dengan situasi terjadi di internal Kraton saat ini

Dalam kamus bahasa indonesia sendiri “galang” memiliki arti barang yang dipasang melintang (seperti bantal, penyangga, ganjal, landasan dari kayu, balok); kayu dan sebagainya penunjang atau penopang supaya tinggi atau supaya tidak rebah; kalang (KBBi 1991:286), tetapi maksud Harian Jogja menggunakan kata “galang” adalah mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak yang tidak

menyetujui atau menolak Sabda Raja dan Dhawuh raja, dan bantuan tersebut untuk menopang atau membantu memperkuat dalam menyangkal realisasi Sabda Raja. Sementara kata “terpukul” berasal dari kata pukul yang memiliki arti ketuk dengan sesuatu yang keras atau berat, dimana Harian Jogja menggambarkan bagaimana perasaan para kerabat Sultan yang tidak senang dengan kondisi konflik yang terjadi di Kraton dan konflik tersebut akibat dari Sabda Raja dan Dhawuh Raja yang di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Tabel 3.15

Frame Harian Jogja : Penolakan Terhadap Sabda Raja Dengan Menggunakan Penggambaran Berbagai Konflik yang Terjadi di Kalangan Internal Kraton Maupun Eksternal Kraton

Elemen	Strategi penulisan
Sintaksis	Penyusunan berita oleh Harian Jogja memperlihatkan berbagai konflik yang di timbulkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja, Harian Jogja juga memperlihatkan ketidak setujuan melalui cara pandang para adik adik sultan maupun kalangan luar Kraton yang tidak setuju mulai <i>headline</i> , sampai <i>lead</i> dan nara sumber berita.
Skrip	Penolakan akan Sabda Raja dan Dhawuh Raja bisa dilihat dengan cara wartawan menyusun berita, Harian Jogja mengisahkan Sabda Raja dan Dhawuh Raja yang dikeluarkan hanya membuat situasi Kraton pelik dan tegang, dan bisa berimbas keluar Kraton
Tematik	(1) lihat saja putri-putrinya yang mana yang tidak diberikan perusahaan? Tetapi soal pengangkatan menjadi ratu, itu kan lain soal(2) Polemik Sabda Raja dan Dhawuh Raja sebenarnya persoalan internal Kraton, tetapi bisa berdampak pada masyarakat(3) ketika diganti dengan Hamengku Bawono yang tidak sepadan dengan terminologi Ngayogyakarta, bagaimana?(4) Sama dengan Presiden RI yang identik dengan negara kesatuan RI sebagai simbol Kenegaraan. Apa jadinya jika diganti negara persatuan RI yang identik dengan federasi(5) Sabda Raja tidak bisa di gugat ke PTUN, karena Sabda Raja bukan bagian dari

	produk hukum, melainkan aturan internal Kraton.
Retoris	Penggunaan leksikon dalam penekanan kata “Galang” dan “terpukul”, dimana Galang adalah bentuk usaha para adik adik Sultan untuk menghimpun bantuan untuk menyadarkan Sultan dan teroukul untuk menggambarkan perasaan para adik adik Sultan.